

Laporan Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2025

Audited

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya, Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 telah selesai disusun. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai entitas akuntansi yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Laporan Keuangan ini menyajikan komponen-komponen pelaporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga menggunakan kaidah pengelolaan keuangan berbasis akrual, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara layak.

Demikian laporan keuangan ini disusun agar dapat menjadi sumber informasi keuangan khususnya tentang keadaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 dan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih baik.

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,



Misni, S.K.M., M.Si.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el: setda@kepriprov.go.id Laman: <https://kepriprov.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana terdapat dalam laporan ini merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,

Misni, S.K.M., M.Si.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2025

JRAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	274.937.981.388,79	262.935.337.874,05	95,63%	368.677.964.441,23
BELANJA OPERASI	268.045.815.702,79	256.510.687.536,05	95,70%	356.566.561.741,23
Belanja Pegawai	89.110.509.127,95	85.974.425.022,00	96,48%	74.118.167.508,00
Belanja Barang dan Jasa	113.541.639.774,84	107.726.909.451,05	94,88%	169.997.461.311,23
Belanja Hibah	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00
BELANJA MODAL	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(274.937.981.388,79)	(262.935.337.874,05)	-95,63%	(368.677.964.441,23)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(274.937.981.388,79)	(262.935.337.874,05)	-95,63%	(368.677.964.441,23)

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,

Misni, S.K.M., M.Si.

Neraca

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2025

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	2.591.100,00	24.000,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.701.056,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.001.755.322,65	1.023.492.770,58
Persediaan	6.285.409,00	5.411.980,00
Jumlah Aset Lancar	1.026.332.887,65	1.028.928.750,58
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	316.542.114.249,56	327.925.074.751,56
Gedung dan Bangunan	130.375.093.807,00	23.936.373.360,63
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.969.830.959,69	17.929.880.959,69
Aset Tetap Lainnya	7.911.384.849,00	7.911.384.849,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(337.346.613.117,15)	(311.369.661.264,58)
Jumlah Aset Tetap	135.451.810.748,10	66.333.052.656,30
Dana Cadangan		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang	8.500.000,00	8.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	708.643.200,00	708.643.200,00
Aset Lain-lain	9.155.434.896,70	5.111.292.023,70

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.138.228.114,70)	(3.084.041.858,70)
Jumlah Aset Lainnya	2.734.349.982,00	2.744.393.567,00
JUMLAH ASET	138.607.113.257,75	70.106.374.973,81
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	24.000,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Utang Belanja	1.669.791.686,00	6.025.297.100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.669.791.686,00	6.025.321.100,00
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.669.791.686,00	6.025.321.100,00
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)		
RK PPKD	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS	136.937.321.571,75	64.081.053.873,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	138.607.113.257,75	70.106.374.973,88

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,

Misni, S.K.M., M.Si.

Laporan Operasional (LO)
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2025

URAIAN	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
LAPORAN OPERASIONAL				
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0%
BEBAN OPERASI	266.700.756.904,35	371.921.454.362,38	(105.220.697.458,03)	-28,29%
Beban Pegawai	85.966.333.404,00	74.113.808.923,00	11.852.524.481,00	15,99%
Beban Barang dan Jasa	109.256.698.121,98	170.119.448.376,76	(60.862.750.254,78)	-35,78%
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Hibah	58.930.662.063,00	116.938.132.922,00	(58.007.470.859,00)	-49,61%
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.234.832.334,84	9.776.886.172,62	(542.053.837,78)	-5,54%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.607.886.027,50	307.876.655,00	2.300.009.372,50	747,06%
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	625.200.779,11	665.301.313,00	(40.100.533,89)	-6,03%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	79.144.173,92	0,00	79.144.173,92	0%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0%
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(266.700.756.904,35)	(371.921.454.362,38)	(105.220.697.458,03)	-28,29%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0 %
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0%

URAIAN	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	8.619.968.671,00	297.675.000,00	8.322.293.671,00	2795,77%
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(8.619.968.671,00)	(297.675.000,00)	(8.322.293.671,00)	-2795,77%
SURPLUS/DEFISIT-LO	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)	(96.898.403.787,03)	-26,03%
POS LUAR BIASA				
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0%
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0%
SURPLUS/DEFISIT-LO	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)	(96.898.403.787,03)	-26,03%

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,

Misni, S.K.M., M.Si.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	64.081.053.873,88	70.132.356.075,49
Surplus/Defisit-Lo	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	262.927.885.389,05	368.677.964.441,23
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain	85.249.107.884,17	(2.510.137.280,46)
EKUITAS AKHIR	136.937.321.571,75	64.081.053.873,88

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,



Misni, S.K.M., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Neraca

Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Maksud dan Tujuan 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 3

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 3

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD.....4

2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD4

2.1.1 Capaian Kinerja Keuangan Biro Hukum 5

2.1.2 Capaian Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 7

2.1.3 Capaian Kinerja Keuangan Biro Organisasi 9

2.1.4 Capaian Kinerja Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat 11

2.1.5 Capaian Kinerja Keuangan Biro Perekonomian dan Pembangunan 13

2.1.6 Capaian Kinerja Keuangan Biro Umum 16

2.1.7 Capaian Kinerja Keuangan Biro Administrasi Pimpinan 19

2.1.8 Capaian Kinerja Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa 20

2.2 Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 22

2.2.1 Biro Hukum..... 22

2.2.2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah..... 22

2.2.3 Biro Organisasi..... 22

2.2.4 Biro Kesejahteraan Rakyat..... 23

2.2.5 Biro Perekonomian dan Pembangunan..... 23

2.2.6 Biro Umum 23

2.2.7 Biro Administrasi Pimpinan..... 23

2.2.8 Biro Pengadaan Barang dan Jasa..... 24

BAB III PENJELASAN POS-POS KEUANGAN25

3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..... 25

3.1.1	Belanja Operasi	30
a.	Belanja Pegawai	31
b.	Belanja Barang dan Jasa	32
c.	Belanja Hibah	33
3.1.2	Belanja Modal.....	34
a.	Belanja Modal Tanah	35
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	35
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	37
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	37
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	37
3.1.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	38
3.2	Neraca	38
3.2.1	Aset	40
a.	Aset Lancar	41
b.	Aset Tetap.....	46
c.	Aset Lainnya	56
3.2.2	Kewajiban.....	62
a.	Kewajiban Jangka Panjang	63
b.	Kewajiban Jangka Pendek.....	63
3.2.3	Ekuitas.....	64
3.3	Laporan Operasional (LO).....	65
3.3.1	Pendapatan-LO	68
3.3.2	Beban	69
3.3.3	Defisit Non Operasional-LO.....	70
3.3.4	Surplus/Defisit-LO	71
3.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	71
3.4.1	Ekuitas Awal	72
3.4.2	Surplus/Defisit-LO	73
3.4.3	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.....	73
3.4.4	Koreksi Ekuitas Lainnya	78
3.4.5	Ekuitas Akhir	80
BAB IV	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	82

4.1 Entitas Akuntansi..... 82

4.2 Struktur Organisasi 82

4.3 Tugas dan Fungsi 83

4.3.1 Staf Ahli 83

4.3.2 Asisten Sekretaris Daerah..... 85

4.3.3 Biro 87

BAB V PENUTUP 107

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jenis Program Kerja pada OPD Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 4

Grafik 2 Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025..... 5

Grafik 3 Capaian Kinerja OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025..... 5

Grafik 4 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025..... 25

Grafik 5 Realisasi Anggaran dan Fisik Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam 3 Tahun Terakhir 26

Grafik 6 Persentase Komponen Rekening Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 30

Grafik 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 38

Grafik 8 Nilai Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025 41

Grafik 9 Nilai Aset Lancar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 42

Grafik 10 Nilai Kas dan Setara Kas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 44

Grafik 11 Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 44

Grafik 12 Nilai Persediaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 45

Grafik 13 Nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 46

Grafik 14 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 47

Grafik 15	Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	51
Grafik 16	Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	52
Grafik 17	Nilai Aset Tetap Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	54
Grafik 18	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	55
Grafik 19	Nilai Aset Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	56
Grafik 20	Nilai Aset Tak Berwujud Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	57
Grafik 21	Nilai Aset Lain-Lain Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025	58
Grafik 22	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	61
Grafik 23	Saldo Kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	62
Grafik 24	Saldo Beban Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	69
Grafik 25	Persentase Perbandingan Beban LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	70
Grafik 26	Saldo Ekuitas Awal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	72
Grafik 27	Ekuitas Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Keuangan Biro Hukum Tahun 2025	5
Tabel 2	Capaian Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025	7
Tabel 3	Capaian Kinerja Keuangan Biro Organisasi Tahun 2025	9
Tabel 4	Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025	11
Tabel 5	Capaian Kinerja Keuangan Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025	13
Tabel 6	Capaian Kinerja Keuangan Biro Umum Tahun 2025	16
Tabel 7	Capaian Kinerja Keuangan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2025	19
Tabel 8	Capaian Kinerja Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	20

Tabel 9	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	26
Tabel 10	Laporan Realisasi Anggaran Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.....	27
Tabel 11	Realisasi Anggaran Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	31
Tabel 12	Realisasi Anggaran Belanja Operasi pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	31
Tabel 13	Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	32
Tabel 14	Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	32
Tabel 15	Realisasi Belanja Barang Dan Jasa pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	32
Tabel 16	Realisasi Belanja Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	33
Tabel 17	Realisasi Belanja Hibah pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	33
Tabel 18	Realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	34
Tabel 19	Realisasi belanja Modal pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	34
Tabel 20	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	35
Tabel 21	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	35
Tabel 22	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran OPD di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.....	38
Tabel 23	Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	39
Tabel 24	Nilai Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025	41
Tabel 25	Nilai Aset Lancar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	42
Tabel 26	Rincian Perbedaan Aset Lancar pada Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025.....	43
Tabel 27	Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	44
Tabel 28	Rincian Nilai Persediaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	45

Tabel 29	Rincian Aset Tetap pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	46
Tabel 30	Nilai Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	48
Tabel 31	Rincian Jurnal Perubahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	48
Tabel 32	Rincian Jurnal Perubahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	51
Tabel 33	Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	52
Tabel 34	Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	53
Tabel 35	Nilai Aset Tetap Lainnya pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	54
Tabel 36	Rincian Perubahan Akumulasi Penyusutan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	55
Tabel 37	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	55
Tabel 38	Nilai Aset Lainnya pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	56
Tabel 39	Nilai Aset Tidak Berwujud pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	58
Tabel 40	Perubahan Aset Lain-Lain Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	59
Tabel 41	Saldo Aset Lain-Lain pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	60
Tabel 42	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	61
Tabel 43	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	62
Tabel 44	Jumlah Kewajiban pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	63
Tabel 45	Rincian Utang Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025	64
Tabel 46	Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	65
Tabel 47	Tabel Selisih Saldo LO	67
Tabel 48	Laporan Operasional pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	67

Tabel 49	Selisih LRA dan LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	67
Tabel 50	Saldo Beban Operasi pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025	69
Tabel 51	Rincian Defisit Non-Operasional-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	70
Tabel 52	Defisit-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	71
Tabel 53	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	71
Tabel 54	Saldo Laporan Perubahan Ekuitas pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	72
Tabel 55	Saldo Ekuitas Awal pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	73
Tabel 56	Rincian Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	73
Tabel 57	Rincian Penerimaan SP2D pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025	74
Tabel 58	Rincian Pengembalian melalui STS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	74
Tabel 59	Rincian Pengembalian UP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	75
Tabel 60	Koreksi Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	75
Tabel 61	Pengembalian Temuan BPK tahun 2025	77
Tabel 62	Koreksi Ekuitas masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	78
Tabel 63	Rincian Koreksi Ekuitas pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	78
Tabel 64	Ekuitas Akhir pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk tanggungjawab Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai entitas akuntansi atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan keuangan memberikan informasi, pencapaian dan kinerja keuangan dan non-keuangan suatu entitas akuntansi.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan tahun 2025 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud meliputi komponen-komponen sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang di atas dan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan menyajikan kriteria-kriteria dan komponen-komponen pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca,

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO),

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada transaksi dan lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Diharapkan laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat khususnya dalam menilai kinerja, akuntabilitas dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan keuangan kedepannya. Dengan demikian penyajian informasi dalam laporan keuangan ini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerima periode berjalan untuk membiayai semua pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi-nya dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Selain informasi-informasi di atas, dalam laporan keuangan ini juga menyajikan informasi tentang:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran, dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara No.182 Tahun 2018);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah nomor 58);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 terbagi menjadi 5 (lima) BAB untuk memudahkan dalam penyajian informasi atas masing-masing topik pembahasan, dengan format sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

BAB III. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

BAB IV. Penjelasan Atas Informasi Non-Keuangan

BAB V. Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA OPD

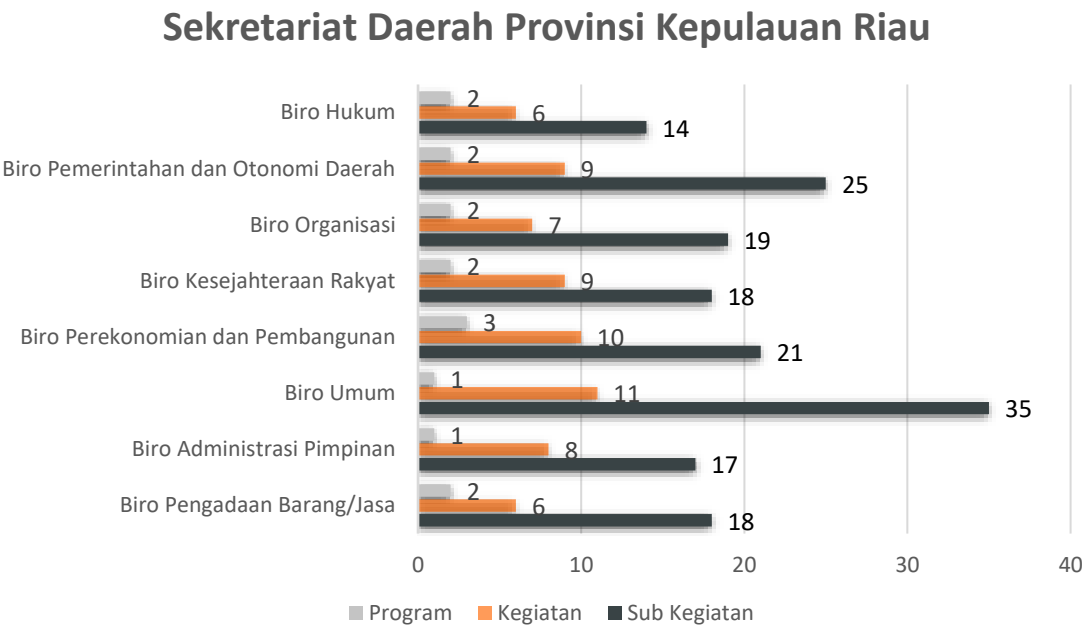
2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp274.937.981.388,79 yang terbagi ke dalam 8 program kerja yang termasuk ke dalam DPA OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- 1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum,
- 2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan,
- 3. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa,
- 4. Program Kesejahteraan Rakyat,
- 5. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,
- 6. Program Penataan Organisasi,
- 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
- 8. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

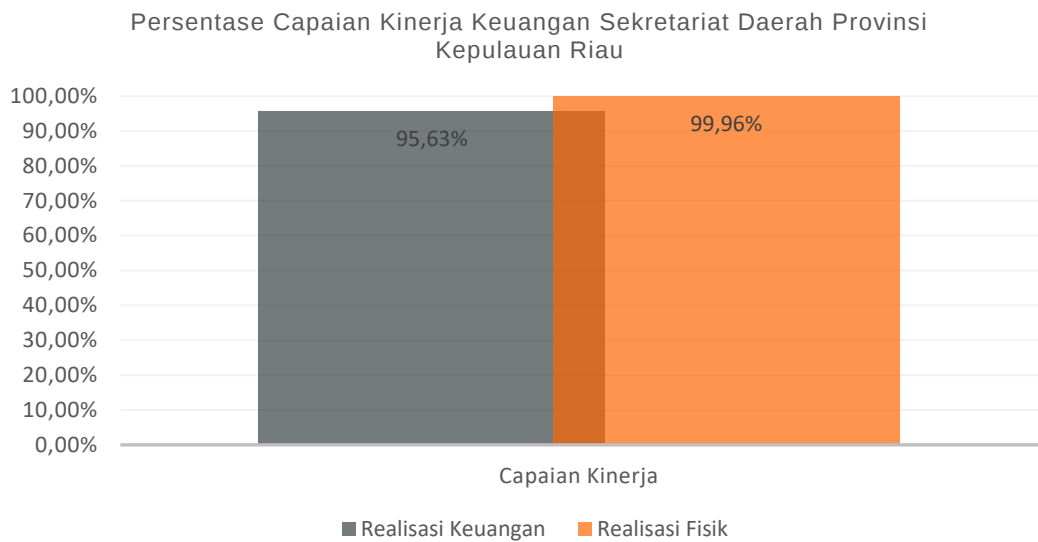
Sedangkan kegiatan yang termasuk ke dapat program kerja tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1 Jenis Program Kerja pada OPD Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

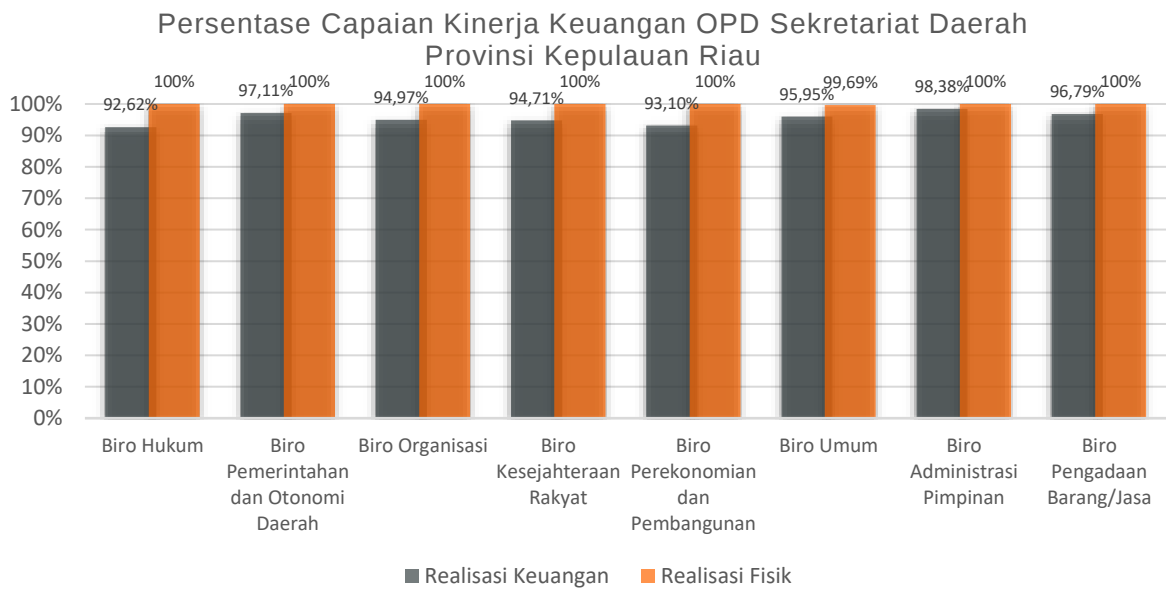


Capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp262.935.337.874,05 atau sebesar 95,63% dengan capaian rata-rata realisasi fisik sebesar 99,96%. Capaian tersebut secara singkat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2 Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Grafik 3 Capaian Kinerja OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Jumlah capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 di atas merupakan akumulasi dari capaian masing-masing OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rinciannya adalah sebagai berikut:

2.1.1 Capaian Kinerja Keuangan Biro Hukum

Capaian kinerja keuangan Biro Hukum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Keuangan Biro Hukum Tahun 2025

Program / Kegiatan			Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
					Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1			2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				595.439.876,00	536.301.731,00	90,07%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.500.314,00	41.046.400,00	94,36%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	43.500.314,00	41.046.400,00	94,36%	100%	

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
	Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Administrasi Umum Perangkat Daerah			255.943.254,00	206.442.293,00	80,66%	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	126.371.300,00	93.522.550,00	74,01%	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.000.000,00	7.027.000,00	87,84%	100%
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.118.893,00	5.164.000,00	51,03%	100%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.453.061,00	100.728.743,00	90,38%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			183.637.364,00	183.553.828,00	99,95%	100%
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	183.637.364,00	183.553.828,00	99,95%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112.358.944,00	105.259.210,00	93,68%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	105.372.984,00	98.552.210,00	93,53%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.985.960,00	6.707.000,00	96,01%	100%
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			1.311.828.633,00	1.232.853.238,00	93,98%	100%
Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan			741.757.634,00	679.045.314,00	91,55%	100%
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	249.606.829,00	223.503.372,00	89,54%	100%
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	256.484.180,00	244.791.814,00	95,44%	100%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	55.797.732,00	45.239.690,00	81,08%	100%
4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	179.868.893,00	162.919.338,00	90,58%	100%
Fasilitas Bantuan Hukum			570.070.999,00	553.807.924,00	97,15%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	342.274.549,00	336.334.397,00	98,26%	100%
2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	227.796.450,00	217.473.527,00	95,47%	100%
Jumlah keseluruhan			1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	92,62%	100%

2.1.2 Capaian Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Capaian kinerja keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.234.201.346,93	1.184.470.718,00	95,97%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.527.700,00	49.964.796,00	98,89%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.527.700,00	49.964.796,00	98,89%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95.744.400,00	92.784.700,00	96,91%	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56.650.000,00	54.933.900,00	96,97%	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39.094.400,00	37.850.800,00	96,82%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			181.510.893,93	176.982.541,00	97,51%	100%
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.880.000,00	6.808.503,00	86,40%	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.500.000,00	7.964.538,00	83,84%	100%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.000.000,00	2.519.877,00	63,00%	100%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.210.893,93	157.769.623,00	99,72%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			462.660.553,00	434.462.134,00	93,91%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	800.000,00	100,00%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.300.000,00	1.544.810,00	67,17%	100%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00%	100%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	421.160.553,00	393.717.324,00	93,48%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			218.300.000,00	208.710.068,00	95,61%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	175.300.000,00	166.603.928,00	95,04%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.000.000,00	2.760.000,00	92,00%	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40.000.000,00	39.346.140,00	98,37%	100%
Fasilitas Materi Dan Komunikasi Pimpinan			225.457.800,00	221.566.479,00	98,27%	100%
1	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	225.457.800,00	221.566.479,00	98,27%	100%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			1.439.948.812,00	1.412.465.249,00	98,09%	100%
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			354.394.000,00	351.237.488,00	99,11%	100%
1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1.378.500,00	1.012.600,00	73,46%	100%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	317.666.020,00	315.371.421,00	99,28%	100%
3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	35.349.480,00	34.853.467,00	98,60%	100%
Pelaksanaan Otonomi Daerah			299.558.352,00	289.645.891,00	96,69%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	14.080.800,00	13.191.516,00	93,68%	100%
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	168.617.052,00	162.278.612,00	96,24%	100%
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	116.860.500,00	114.175.763,00	97,70%	100%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah			785.996.460,00	771.581.870,00	98,17%	100%
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	703.114.038,00	692.259.706,00	98,46%	100%
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	37.136.756,00	35.868.776,00	96,59%	100%
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	45.745.666,00	43.453.388,00	94,99%	100%
Jumlah keseluruhan			2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	97,11%	100%

2.1.3 Capaian Kinerja Keuangan Biro Organisasi

Capaian kinerja keuangan Biro Organisasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Keuangan Biro Organisasi Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			683.423.729,63	667.750.184,00	97,71%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.934.382,00	98.521.346,00	97,61%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.934.382,00	98.521.346,00	97,61%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.800.000,00	17.400.000,00	87,88%	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19.800.000,00	17.400.000,00	87,88%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			170.238.345,63	169.391.527,00	99,50%	100%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.451.358,63	44.868.820,00	98,72%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.242.200,00	2.242.200,00	100,00%	100%
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.920.000,00	4.903.590,00	99,67%	100%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.624.787,00	117.376.917,00	99,79%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268.083.902,00	259.981.911,00	96,98%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.950.270,00	4.682.777,00	58,90%	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46.620.000,00	46.620.000,00	100,00%	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	213.513.632,00	208.679.134,00	97,74%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			124.367.100,00	122.455.400,00	98,46%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	116.486.100,00	114.931.300,00	98,67%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.881.000,00	7.524.100,00	95,47%	100%
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			244.471.066,00	213.513.186,00	87,34%	100%
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			72.838.062,00	64.057.071,00	87,94%	100%
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	18.260.352,00	15.510.955,00	84,94%	100%
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	17.322.677,00	16.670.600,00	96,24%	100%
3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	37.255.033,00	31.875.516,00	85,56%	100%
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			171.633.004,00	149.456.115,00	87,08%	100%
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	54.424.314,00	40.882.838,00	75,12%	100%
2	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	23.324.068,00	23.102.724,00	99,05%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja				
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	20.395.130,00	17.506.748,00	85,84%	100%
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	38.913.351,00	35.044.531,00	90,06%	100%
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	34.576.141,00	32.919.274,00	95,21%	100%
Jumlah keseluruhan			927.894.795,63	881.263.370,00	94,97%	100%

2.1.4 Capaian Kinerja Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			998.195.204,00	820.526.784,00	82,20%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.036.100,00	39.026.100,00	48,76%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.425.500,00	18.394.700,00	85,85%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.038.600,00	3.666.600,00	14,08%	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.572.000,00	16.964.800,00	52,08%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.500.000,00	2.280.000,00	21,71%	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000,00	2.280.000,00	21,71%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			427.978.751,00	331.780.192,00	77,52%	100%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59.471.751,00	44.092.915,00	74,14%	100%
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	368.507.000,00	287.687.277,00	78,07%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
		dan Konsultasi SKPD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			34.410.000,00	34.410.000,00	100,00%	100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34.410.000,00	34.410.000,00	100,00%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			245.258.441,00	235.523.262,00	96,03%	100%
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	103.740.000,00	96.745.390,00	93,26%	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	141.518.441,00	138.777.872,00	98,06%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.011.912,00	177.507.230,00	88,75%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	200.011.912,00	177.507.230,00	88,75%	100%
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			75.119.595.431,58	71.268.447.641,00	94,87%	100%
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			66.255.989.176,58	62.784.174.619,00	94,76%	100%
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	94,56%	100%
2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	95,32%	100%
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			8.758.500.655,00	8.405.375.022,00	95,97%	100%
1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	8.690.413.855,00	8.358.805.822,00	96,18%	100%
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	30.567.600,00	20.490.400,00	67,03%	100%
3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	37.519.200,00	26.078.800,00	69,51%	100%
Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			105.105.600,00	78.898.000,00	75,07%	100%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	40.797.200,00	33.828.800,00	82,92%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
	Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	32.271.200,00	23.565.000,00	73,02%	100%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	32.037.200,00	21.504.200,00	67,12%	100%
Jumlah keseluruhan			76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	94,71%	100%

2.1.5 Capaian Kinerja Keuangan Biro Perekonomian dan Pembangunan

Capaian kinerja keuangan Biro Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Keuangan Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.201.436.712,25	1.106.911.301,00	92,13%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			131.930.833,00	123.112.686,00	93,32%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	99.621.833,00	91.644.426,00	91,99%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.309.000,00	31.468.260,00	97,40%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			224.740.109,00	217.390.273,00	96,73%	100%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67.703.609,00	65.689.803,00	97,03%	100%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.847.500,00	16.600.280,00	98,53%	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.189.000,00	135.100.190,00	96,37%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			442.353.658,00	424.047.498,00	95,86%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22.008.048,00	9.901.908,00	44,99%	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96.706.200,00	96.636.000,00	99,93%	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	323.639.410,00	317.509.590,00	98,11%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.557.500,00	124.133.826,00	98,87%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	113.337.500,00	112.682.376,00	99,42%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.220.000,00	11.451.450,00	93,71%	100%
Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			276.854.612,25	218.227.018,00	78,82%	100%
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	276.854.612,25	218.227.018,00	78,82%	100%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			351.320.920,00	337.295.059,00	96,01%	100%
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			98.168.837,00	94.077.770,00	95,83%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	44.608.657,00	42.535.980,00	95,35%	100%
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	53.560.180,00	51.541.790,00	96,23%	100%
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			44.514.417,00	43.947.185,00	98,73%	100%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	44.514.417,00	43.947.185,00	98,73%	100%
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			208.637.666,00	199.270.104,00	95,51%	100%
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	41.820.117,00	40.150.280,00	96,01%	100%
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	67.119.928,00	65.997.552,00	98,33%	100%
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	81.309.687,00	78.406.722,00	96,43%	100%
4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	18.387.934,00	14.715.550,00	80,03%	100%
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			143.262.125,00	134.761.588,00	94,07%	100%
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			110.920.207,00	106.031.022,00	95,59%	100%
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	76.346.749,00	72.500.070,00	94,96%	100%
2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	34.573.458,00	33.530.952,00	96,98%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			32.341.918,00	28.730.566,00	88,83%	100%
1	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	32.341.918,00	28.730.566,00	88,83%	100%
Jumlah keseluruhan			1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	93,10%	100%

2.1.6 Capaian Kinerja Keuangan Biro Umum

Capaian kinerja keuangan Biro Umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Keuangan Biro Umum Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	95,95%	99,7%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			119.396.005,00	116.421.281,00	97,51%	99,7%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	119.396.005,00	116.421.281,00	97,51%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			88.131.664.384,95	84.985.620.887,00	96,43%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84.879.138.084,95	82.193.330.030,00	96,84%	99,89%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.108.299.300,00	2.649.206.965,00	85,23%	100%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.594.000,00	63.572.439,00	98,42%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	79.633.000,00	79.511.453,00	99,85%	95,58%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			653.226.230,80	644.627.817,00	98,68%	100%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	514.881.730,80	506.676.317,00	98,41%	100%
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	138.344.500,00	137.951.500,00	99,72%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			253.498.030,00	251.826.115,00	99,34%	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	253.498.030,00	251.826.115,00	99,34%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.942.335.082,03	17.460.329.036,00	97,31%	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.869.558.035,00	1.693.944.984,00	90,61%	100%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	239.318.200,00	73.503.070,00	30,71%	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.891.542.745,00	9.858.429.824,00	99,67%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	314.321.505,00	299.773.934,00	95,37%	100%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	53.565.315,00	51.606.822,00	96,34%	100%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.635.953.031,03	4.554.708.248,00	98,25%	100%
7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	826.702.901,00	817.532.032,00	98,89%	100%
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	111.373.350,00	110.830.122,00	99,51%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.526.666.724,00	23.208.161.251,00	98,65%	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22.593.102.404,00	22.281.815.253,00	98,62%	100%
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	933.564.320,00	926.345.998,00	99,23%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.598.339.451,82	9.630.465.061,05	90,87%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	598.061.004,00	593.496.722,00	99,24%	100%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	97,57%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.165.328.827,00	1.100.893.145,00	94,47%	100%
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	772.049.030,00	765.777.633,00	99,19%	100%
6	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	3.859.585.479,82	3.069.259.154,05	79,52%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.363.784.091,91	29.637.141.179,00	94,49%	99,31%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169.011.435,00	164.692.366,00	97,44%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.122.266.020,00	6.466.890.226,00	90,80%	97,93%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.882.781.337,30	6.829.210.494,00	99,22%	100%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17.189.725.299,61	16.176.348.093,00	94,10%	99,6%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.691.326.335,00	4.204.146.122,00	89,62%	99,29%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	72,49%	100%
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	350.869.000,00	347.236.836,00	98,96%	100%
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33.089.792,00	-	-	-
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.670.728.356,00	2.670.546.186,00	99,99%	100%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			6.317.243.702,00	6.128.801.183,00	97,02%	96,72%
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2.576.628.313,00	2.515.912.420,00	97,64%	96,74%
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2.526.746.144,00	2.485.616.361,00	98,37%	95,12%
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	1.213.869.245,00	1.127.272.402,00	92,87%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah yang Disediakan				
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			516.396.240,49	397.638.833,00	77,00%	99,98%
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	516.396.240,49	397.638.833,00	77,00%	99,98%
Jumlah keseluruhan			184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	95,95%	99,69%

2.1.7 Capaian Kinerja Keuangan Biro Administrasi Pimpinan

Capaian kinerja keuangan Biro Administrasi Pimpinan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja Keuangan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	98,38%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.419.650,00	74.290.479,00	99,83%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.419.650,00	74.290.479,00	99,83%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			63.272.800,00	55.820.347,00	88,22%	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63.272.800,00	55.820.347,00	88,22%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			386.148.290,40	386.121.109,00	99,99%	100%
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16.302.900,00	16.302.900,00	100%	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.608.000,00	9.608.000,00	100%	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.237.390,40	360.210.209,00	99,99%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.398.000,00	8.397.594,00	100%	100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8.398.000,00	8.397.594,00	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.886.430.218,00	1.839.348.578,00	97,50%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	123.173.558,00	122.374.000,00	99,35%	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	171.600.000,00	171.400.000,00	99,88%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
		Kantor yang Disediakan				
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.591.656.660,00	1.545.574.578,00	97,10%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			193.408.000,00	193.200.558,00	99,89%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	151.238.000,00	151.032.558,00	99,86%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42.170.000,00	42.168.000,00	100%	100%
Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			1.150.744.107,00	1.129.323.045,00	98,14%	100%
1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	51.688.300,00	51.688.300,00	100%	100%
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	534.916.344,00	513.685.015,00	96,03%	100%
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	564.139.463,00	563.949.730,00	99,97%	100%
Fasilitas Keprotokolan			2.335.740.059,00	2.313.552.004,00	99,05%	100%
1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.376.008.161,82	1.355.772.495,00	98,53%	100%
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	586.156.100,00	584.809.240,00	99,77%	100%
3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	373.575.797,18	372.970.269,00	99,84%	100%
Jumlah keseluruhan			6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	98,38%	100%

2.1.8 Capaian Kinerja Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian kinerja keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.248.562.998,00	1.203.743.816,00	96,41%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			215.772.410,00	204.482.654,00	94,77%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	215.772.410,00	204.482.654,00	94,77%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			394.662.266,00	367.100.444,00	93,02%	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.072.600,00	5.024.970,00	99,06%	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29.697.746,00	21.983.550,00	74,02%	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	124.171.600,00	120.973.120,00	97,42%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13.004.400,00	11.328.240,00	87,11%	100%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11.520.000,00	11.280.000,00	97,92%	100%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000,00	1.050.000,00	21,21%	0%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.245.920,00	195.460.564,00	94,77%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			443.549.560,00	438.518.660,00	98,87%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.666.000,00	2.660.000,00	99,77%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.592.000,00	6.959.129,00	81,00%	100%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00%	100%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	348.291.560,00	344.899.531,00	99,03%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			194.578.762,00	193.642.058,00	99,52%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	184.638.762,00	184.151.558,00	99,74%	100%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.940.000,00	9.490.500,00	95,48%	100%
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			153.857.132,00	153.656.000,00	99,87%	100%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			19.891.800,00	19.787.000,00	99,47%	100%

Program / Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025		
				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	10.570.900,00	10.525.000,00	99,57%	100%
2	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	9.320.900,00	9.262.000,00	99,37%	100%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			133.965.332,00	133.869.000,00	99,93%	100%
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3.620.900,00	3.525.000,00	97,35%	100%
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.344.432,00	130.344.000,00	100,00%	100%
<i>Jumlah keseluruhan</i>			1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	96,79%	100%

2.2 Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsinya, OPD di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

2.2.1 Biro Hukum

1. Belum optimalnya koordinasi SKPD dan kabupaten/kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
2. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya;
3. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pendidikan pelatihan bagi SDM penyusun produk hukum daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

2.2.2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Belum optimalnya penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan daerah dan pulau-pulau perbatasan serta belum terselesaikannya batas darat antar kabupaten/kota;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan se-Provinsi Kepulauan Riau;
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.2.3 Biro Organisasi

1. Masih rendahnya kualitas koordinasi antara Biro Organisasi dan Korpri dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penerapan Zona Integritas;

2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan tata laksana dan kelembagaan organisasi pada perangkat daerah;
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.2.4 Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
2. Belum tersusunnya *database* dibidang keagamaan secara aktual;
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.2.5 Biro Perekonomian dan Pembangunan

1. Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah;
2. Masih adanya kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan namun belum diimplementasikan dan ditindaklanjuti;
3. Belum optimalnya kinerja BUMD akibat masih minimnya kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.2.6 Biro Umum

1. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Belum optimalnya pelayanan kedinasan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Belum optimalnya pelayanan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Belum optimalnya pengelolaan aset di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.2.7 Biro Administrasi Pimpinan

1. Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat;

2. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur Biro Administrasi Pimpinan di bidang pelayanan kedinasan KDh/WKDh;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola kehumasan serta keprotokolan;
4. Belum optimalnya tata hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih harmonis dan sinergis;
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.2.8 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga pendampingan kepada SKPD terkait proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi tidak maksimal;
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa dalam memahami aturan terbaru terkait pengadaan/barang jasa Pemerintah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan;
4. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pos-Pos Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 (periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025) meliputi:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2025,
- 2. Neraca per 31 Desember 2025,
- 3. Laporan Operasional (LO) tahun 2025, dan
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2025.

Terdapat selisih antara nilai realisasi laporan keuangan ini dengan data SIPD dikarenakan adanya transaksi pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) yang belum tercatat dalam sistem pembukuan pada akun Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, namun dapat dilihat pada akun Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku entitas akuntansi.

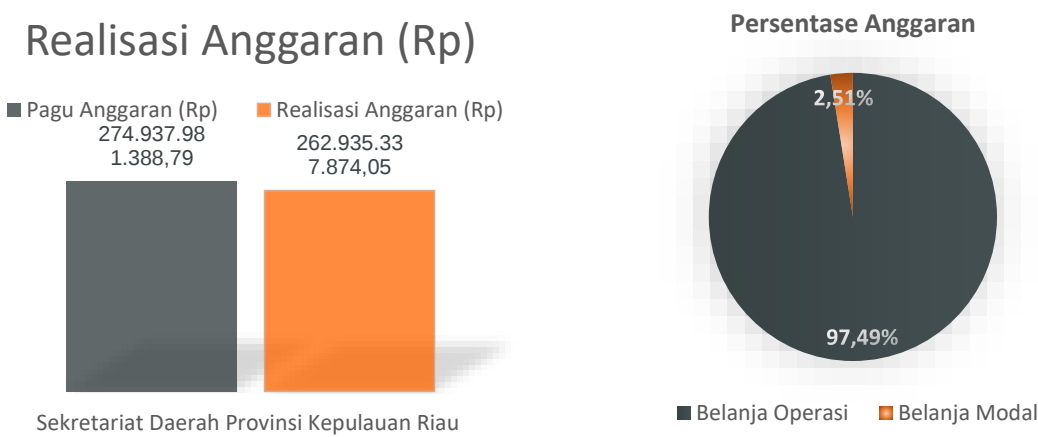
Perbedaan data tersebut mempengaruhi nilai Neraca yang muncul sebagai saldo kas negatif pada akun Kas di Bendahara, dan pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak tercatat pada saldo Kewajiban untuk Dikonsolidasikan/RK PPKD. Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing pos-pos Laporan Keuangan disajikan sebagai berikut:

3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

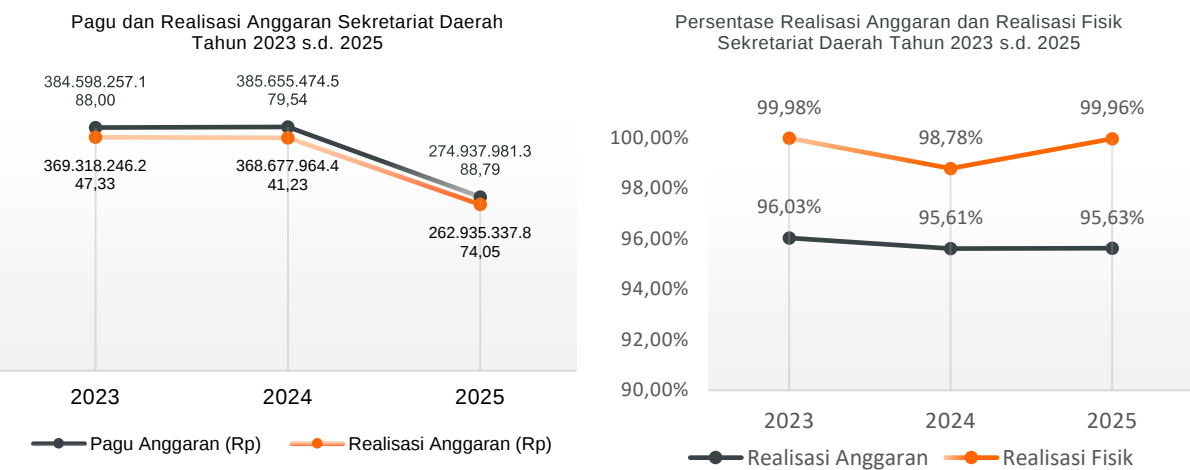
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Belanja adalah semua pengeluaran melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam anggaran bersangkutan, dan tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Secara singkat, informasi tentang anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 dan realisasinya dapat dilihat pada grafik-grafik di bawah ini:

Grafik 4 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Grafik 5 Realisasi Anggaran dan Fisik Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam 3 Tahun Terakhir



Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Belanja Operasi, dan
- b. Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	274.937.981.388,79	262.935.337.874,05	95,63%	368.677.964.441,23
BELANJA OPERASI	268.045.815.702,79	256.510.687.536,05	95,70%	356.566.561.741,23
Belanja Pegawai	89.110.509.127,95	85.974.425.022,00	96,48%	74.118.167.508,00
Belanja Barang dan Jasa	113.541.639.774,84	107.726.909.451,05	94,88%	169.997.461.311,23
Belanja Hibah	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00
BELANJA MODAL	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(274.937.981.388,79)	(262.935.337.874,05)	-95,63%	(368.677.964.441,23)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(274.937.981.388,79)	(262.935.337.874,05)	-95,63%	(368.677.964.441,23)

Rincian realisasi anggaran pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Laporan Realisasi Anggaran Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Biro Hukum

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	92,62%	2.889.204.096,00
BELANJA OPERASI	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	93,92%	2.790.788.096,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	93,92%	2.790.788.096,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
BELANJA MODAL	92.771.300,00	62.472.550,00	67,34%	98.416.000,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.771.300,00	62.472.550,00	67,34%	98.416.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(1.907.268.509,00)	(1.766.563.869,00)	-92,62%	(2.889.204.096,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(1.907.268.509,00)	(1.766.563.869,00)	-92,62%	(2.889.204.096,00)

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	97,11%	4.212.198.024,00
BELANJA OPERASI	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	97,14%	4.082.833.024,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	97,14%	4.082.833.024,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
BELANJA MODAL	5.288.616,00	4.390.000,00	83,01%	129.365.000,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.288.616,00	4.390.000,00	83,01%	129.365.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(2.674.150.158,93)	(2.596.935.967,00)	-97,11%	(4.212.198.024,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(2.674.150.158,93)	(2.596.935.967,00)	-97,11%	(4.212.198.024,00)

Biro Organisasi

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	927.894.795,63	881.263.370,00	94,97%	1.887.569.891,00
BELANJA OPERASI	927.894.795,63	881.263.370,00	94,97%	1.609.519.891,00

Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	927.894.795,63	881.263.370,00	94,97%	1.609.519.891,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00%	278.050.000,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00%	278.050.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(927.894.795,63)	(881.263.370,00)	-94,97%	(1.887.569.891,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(927.894.795,63)	(881.263.370,00)	-94,97%	(1.887.569.891,00)

Biro Kesejahteraan Rakyat

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	94,71%	151.890.719.111,00
BELANJA OPERASI	76.056.131.911,58	72.028.923.425,00	94,70%	151.659.146.111,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	29.120.492.611,58	27.468.767.150,00	94,33%	50.522.965.789,00
Belanja Hibah	46.935.639.300,00	44.560.156.275,00	94,94%	101.136.180.322,00
BELANJA MODAL	61.658.724,00	60.051.000,00	97,39%	231.573.000,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.658.724,00	60.051.000,00	97,39%	231.573.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(76.117.790.635,58)	(72.088.974.425,00)	-94,71%	(151.890.719.111,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(76.117.790.635,58)	(72.088.974.425,00)	-94,71%	(151.890.719.111,00)

Biro Perekonomian dan Pembangunan

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	93,10%	3.050.883.564,00
BELANJA OPERASI	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	93,08%	3.050.883.564,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	93,08%	3.050.883.564,00
Belanja Hibah		0,00	0,00%	0,00
BELANJA MODAL	4.450.500,00	4.384.500,00	98,52%	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.450.500,00	4.384.500,00	98,52%	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(1.696.019.757,25)	(1.578.967.948,00)	-93,10%	(3.050.883.564,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(1.696.019.757,25)	(1.578.967.948,00)	-93,10%	(3.050.883.564,00)

Biro Umum

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	95,95%	190.718.403.762,23
BELANJA OPERASI	177.436.020.478,00	170.414.252.621,05	96,04%	179.648.115.662,23
Belanja Pegawai	89.110.509.127,95	85.974.425.022,00	96,48%	74.118.167.508,00
Belanja Barang dan Jasa	69.867.483.850,05	66.190.630.811,05	94,74%	94.215.195.554,23
Belanja Hibah	18.458.027.500,00	18.249.196.788,00	98,87%	11.314.752.600,00
BELANJA MODAL	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	93,61%	11.070.288.100,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	93,61%	11.070.288.100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(184.113.876.278,00)	(176.665.178.765,05)	-95,95%	(190.718.403.762,23)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(184.113.876.278,00)	(176.665.178.765,05)	-95,95%	(190.718.403.762,23)

Biro Administrasi Pimpinan

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	98,38%	11.743.835.725,00
BELANJA OPERASI	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	98,38%	11.582.460.325,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	98,38%	11.582.460.325,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
BELANJA MODAL	20.443.000,00	20.442.594,00	100,00%	161.375.400,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.443.000,00	20.442.594,00	99,998%	161.375.400,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(6.098.561.124,40)	(6.000.053.714,00)	-98,38%	(11.743.835.725,00)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(6.098.561.124,40)	(6.000.053.714,00)	-98,38%	(11.743.835.725,00)
--	--------------------	--------------------	---------	---------------------

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	96,79%	2.285.150.268,00
BELANJA OPERASI	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	97,28%	2.142.815.068,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	97,28%	2.142.815.068,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
BELANJA MODAL	29.697.746,00	21.983.550,00	74,02%	142.335.200,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.697.746,00	21.983.550,00	74,02%	142.335.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Surplus / Defisit	(1.402.420.130,00)	(1.357.399.816,00)	-96,79%	(2.285.150.268,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(1.402.420.130,00)	(1.357.399.816,00)	-96,79%	(2.285.150.268,00)

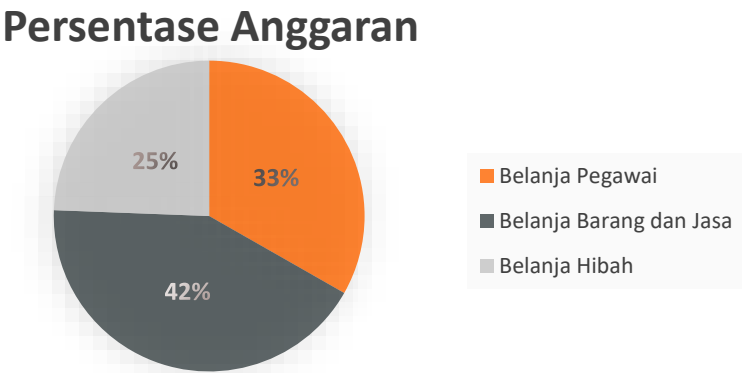
3.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Pada tahun anggaran 2025 pagu anggaran belanja operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp268.045.815.702,79 yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai,
- Belanja Barang dan Jasa, dan
- Belanja Hibah.

Persentase komponen rekening belanja operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6 Persentase Komponen Rekening Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sedangkan realisasi belanja operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 256.510.687.536,05 atau sebesar 95,70%, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	89.110.509.127,95	85.974.425.022,00	96,48%	74.118.167.508,00
Belanja Barang dan Jasa	113.541.639.774,84	107.726.909.451,05	94,88%	169.997.461.311,23
Belanja Hibah	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00
Jumlah	268.045.815.702,79	256.510.687.536,05	95,70%	356.566.561.741,23

Realisasi anggaran pada tabel di atas merupakan nilai akumulasi realisasi belanja operasi yang berasal dari masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Anggaran Belanja Operasi pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	93,92%	2.790.788.096,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	97,14%	4.082.833.024,00
Biro Organisasi	927.894.795,63	881.263.370,00	94,97%	1.609.519.891,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	76.056.131.911,58	72.028.923.425,00	94,70%	151.659.146.111,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	93,08%	3.050.883.564,00
Biro Umum	177.436.020.478,00	170.414.252.621,05	96,04%	179.648.115.662,23
Biro Administrasi Pimpinan	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	98,38%	11.582.460.325,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	97,28%	2.142.815.068,00
Jumlah	268.045.815.702,79	256.510.687.536,05	95,70%	356.566.561.741,23

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada tahun 2025 merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN, belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH yang anggarannya dan realisasinya berada di Biro Umum sebagaimana terdapat pada tabel 10 di atas. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	37.332.733.832,95	35.575.694.060,00	95,29%	20.701.016.276,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	47.501.118.252,00	46.572.350.006,00	98,04%	46.992.464.032,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0%	2.594.473.500,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	72,49%	1.321.600.258,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	100%	2.508.613.442,00
Jumlah	89.110.509.127,95	85.974.425.022,00	96,48%	74.118.167.508,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Rincian belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja barang	29.130.940.633,14	28.225.916.277,00	96,89%	39.898.218.237,00
Belanja jasa	55.902.786.947,10	52.844.120.581,00	94,52%	75.151.530.957,40
Belanja pemeliharaan	5.403.503.046,00	4.707.365.873,05	87,11%	9.157.704.789,83
Belanja perjalanan dinas	11.158.909.148,60	10.046.306.720,00	90,02%	17.485.647.327,00
Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	11.945.500.000,00	11.903.200.000,00	99,64	28.304.360.000,00
Jumlah	113.541.639.774,84	107.726.909.451,05	94,87	169.997.461.311,23

Realisasi belanja barang dan jasa pada tabel di atas merupakan nilai akumulasi dari realisasi belanja Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Belanja Barang Dan Jasa pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	93,92%	2.790.788.096,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	97,14%	4.082.833.024,00

Biro Organisasi	927.894.795,63	881.263.370,00	94,97%	1.609.519.891,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	29.120.492.611,58	27.468.767.150,00	94,33%	50.522.965.789,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	93,08%	3.050.883.564,00
Biro Umum	69.867.483.850,05	66.190.630.811,05	94,74%	94.215.195.554,23
Biro Administrasi Pimpinan	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	98,38%	11.582.460.325,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	97,28%	2.142.815.068,00
Jumlah	113.541.639.774,84	107.726.909.451,05	94,88%	169.997.461.311,23

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pagu anggaran Belanja hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebesar Rp65.393.666.800,00.

Rincian belanja hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Belanja Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0%	736.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00
Jumlah	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00

Realisasi belanja hibah tersebut di atas merupakan akumulasi dari jumlah realisasi belanja hibah Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Umum pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Belanja Hibah pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	46.935.639.300,00	44.560.156.275,00	94,93%	101.136.180.322,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Umum	18.458.027.500,00	18.249.196.788,00	98,86%	11.314.752.600,00

Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0%	0,00
Jumlah	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00

3.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta *overhaul*/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap.

Anggaran belanja modal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebesar Rp6.892.165.686,00 yang seluruhnya merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0%	0,00
Jumlah	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00

Nilai tersebut merupakan akumulasi realisasi dari OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi belanja Modal pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	46.935.639.300,00	44.560.156.275,00	94,93%	101.136.180.322,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Umum	18.458.027.500,00	18.249.196.788,00	98,86%	11.314.752.600,00

Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0%	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0%	0,00
Jumlah	65.393.666.800,00	62.809.353.063,00	96,05%	112.450.932.922,00

a. Belanja Modal Tanah

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tidak memiliki anggaran dan realisasi belanja modal tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebesar Rp6.892.165.686,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Berat	19.780.200,00	19.000.000,00	96,05%	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.025.170.000,00	4.919.670.000,00	97,90%	7.877.477.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.534.671.500,00	1.226.635.644,00	79,92%	2.669.670.200,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.703.700,00	15.430.500,00	98,26%	401.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0%	0,00
Belanja Modal Komputer	296.840.286,00	243.914.194,00	82,17%	1.082.793.400,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0%	0,00
Jumlah	6.892.165.686,00	6.424.650.338,00	93,22%	12.111.402.700,00

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Biro Hukum

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.475.400,00	9.379.500,00	98,98%	47.940.000,00
Belanja Modal Komputer	83.295.900,00	53.093.050,00	63,74%	50.476.000,00
Jumlah	92.771.300,00	62.472.550,00	67,34%	98.416.000,00

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.795.000,00	3.300.000,00	86,95%	85.765.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0%	3.500.000,00
Belanja Modal Komputer	1.493.616,00	1.090.000,00	72,97%	40.100.000,00
Jumlah	5.288.616,00	4.390.000,00	83%	129.365.000,00

Biro Organisasi

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0%	274.250.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0%	3.800.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0%	278.050.000,00

Biro Kesejahteraan Rakyat

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0%	216.741.000,00
Belanja Modal Komputer	61.658.724,00	60.051.000,00	97,39%	14.832.000,00
Jumlah	61.658.724,00	60.051.000,00	97,39%	231.573.000,00

Biro Perekonomian dan Pembangunan

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Komputer	4.450.500,00	4.384.500,00	98,51%	0,00
Jumlah	4.450.500,00	4.384.500,00	98,51%	0,00

Biro Umum

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	19.780.200,00	19.000.000,00	96,05%	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.025.170.000,00	4.919.670.000,00	97,90%	7.877.477.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0%	1.962.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.521.401.100,00	1.213.956.144,00	79,79%	2.038.609.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0%	394.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0%	55.000.000,00
Belanja Modal Komputer	111.504.500,00	98.300.000,00	88,15%	680.040.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0%	23.000.000,00
Jumlah	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	93,60%	11.070.288.100,00

Biro Administrasi Pimpinan

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.045.000,00	12.045.000,00	100%	0,00
Belanja Modal Komputer	8.398.000,00	8.397.594,00	99,99%	161.375.400,00
Jumlah	20.443.000,00	20.442.594,00	99,99%	161.375.400,00

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0%	6.365.200,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.658.700,00	3.385.500,00	92,53%	0,00
Belanja Modal Komputer	26.039.046,00	18.598.050,00	71,42%	135.970.000,00
Jumlah	29.697.746,00	21.983.550,00	74,02%	142.335.200,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk perolehan, pembangunan, penambahan, atau penggantian aset tetap berupa gedung dan bangunan. Selama tahun anggaran 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tidak memiliki anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

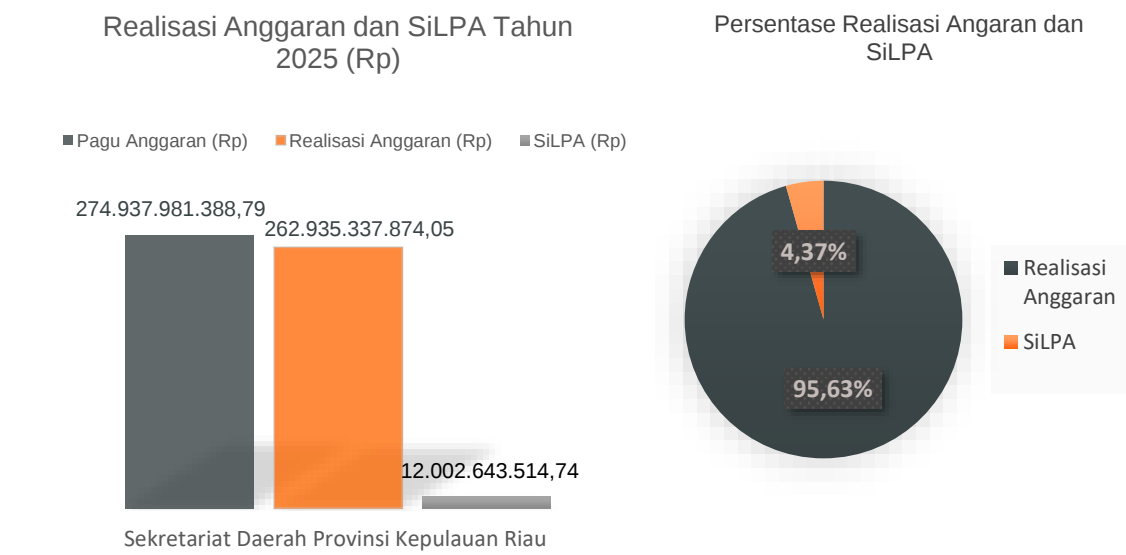
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tidak memiliki anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya.

3.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan pengeluaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rangkuman SiLPA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Jumlah tersebut di atas merupakan akumulasi dari jumlah SiLPA masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran OPD di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

OPD	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
Biro Hukum	140.704.640,00	7,38%
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	77.214.191,93	2,89%
Biro Organisasi	46.631.425,63	5,03%
Biro Kesejahteraan Rakyat	4.028.816.210,58	5,29%
Biro Perekonomian dan Pembangunan	117.051.809,25	6,90%
Biro Umum	7.448.697.512,95	4,05%
Biro Administrasi Pimpinan	98.507.410,40	1,62%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	45.020.314,00	3,21%
Jumlah	12.002.643.514,74	4,37%

3.2 Neraca

Neraca menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu entitas pada periode pelaporan tertentu yang diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai kondisi keuangan, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, mengevaluasi perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Neraca menyajikan informasi secara komparatif antara nilai tahun berjalan (tahun 2025) dengan periode sebelumnya (tahun 2024) atas pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Pajak Dan Bukan Pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kewajiban Jangka Panjang;
- i. Ekuitas.

Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian Pos Neraca	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	2.591.100,00	24.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.701.056,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.001.755.322,65	1.023.492.770,58
Persediaan	6.285.409,00	5.411.980,00
Jumlah Aset Lancar	1.026.332.887,65	1.028.928.750,58
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	316.542.114.249,56	327.925.074.751,56
Gedung dan Bangunan	130.375.093.807,00	23.936.373.360,63
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.969.830.959,69	17.929.880.959,69
Aset Tetap Lainnya	7.911.384.849,00	7.911.384.849,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(337.346.613.117,15)	(311.369.661.264,58)
Jumlah aset tetap	135.451.810.748,10	66.333.052.656,30

Dana Cadangan		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang	8.500.000,00	8.500.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	708.643.200,00	708.643.200,00
Aset Lain-lain	8.550.054.536,70	5.111.292.023,70
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.138.228.114,70)	(3.084.041.656,70)
Jumlah Aset Lainnya	2.128.969.622,00	2.744.393.567,00
JUMLAH ASET	138.607.113.257,75	70.106.374.973,88
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	24.000,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	1.669.791.686,00	6.025.297.100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.669.791.686,00	6.025.321.100,00
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.669.791.686,00	6.025.321.100,00
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas	136.937.321.571,75	64.081.053.873,77
JUMLAH EKUITAS	136.937.321.571,75	64.081.053.873,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	138.607.113.257,75	70.106.374.973,88

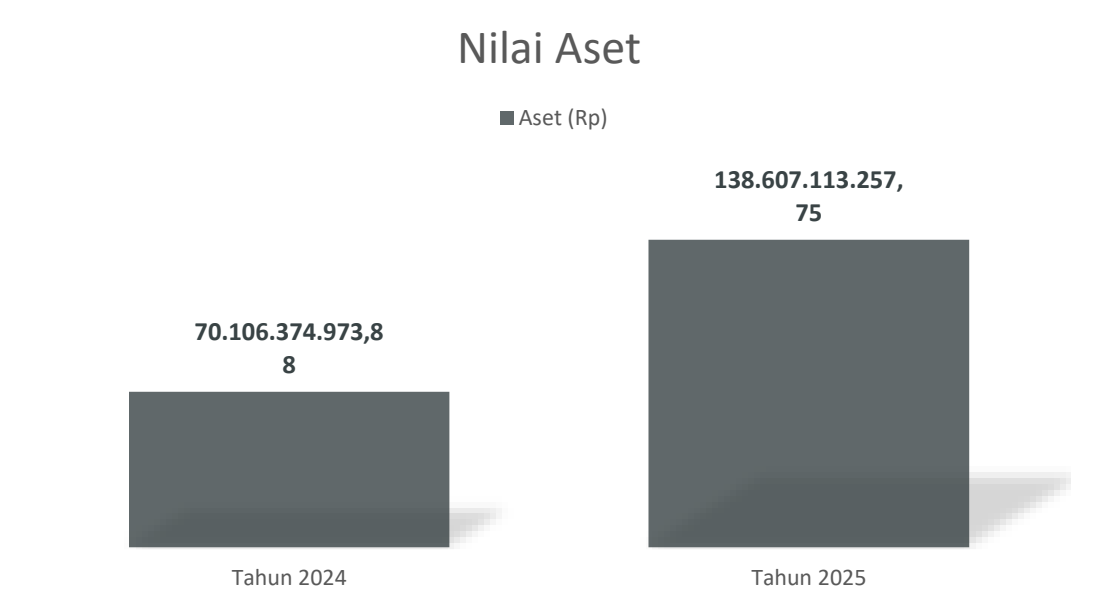
3.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 8 Nilai Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025



Rincian nilai aset pada masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Nilai Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	499.499.173,70	501.138.725,58
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	481.966.050,69	605.696.065,33
Biro Organisasi	299.292.896,67	464.005.816,67
Biro Kesejahteraan Rakyat	82.930.716.705,43	7.733.185.693,57
Biro Perekonomian dan Pembangunan	576.263.311,43	713.089.552,09
Biro Umum	49.085.963.709,89	54.670.856.156,16
Biro Administrasi Pimpinan	2.091.271.190,17	2.515.555.916,29
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.642.140.219,77	2.902.847.048,19
Jumlah	138.607.113.257,75	70.106.374.973,88

a. Aset Lancar

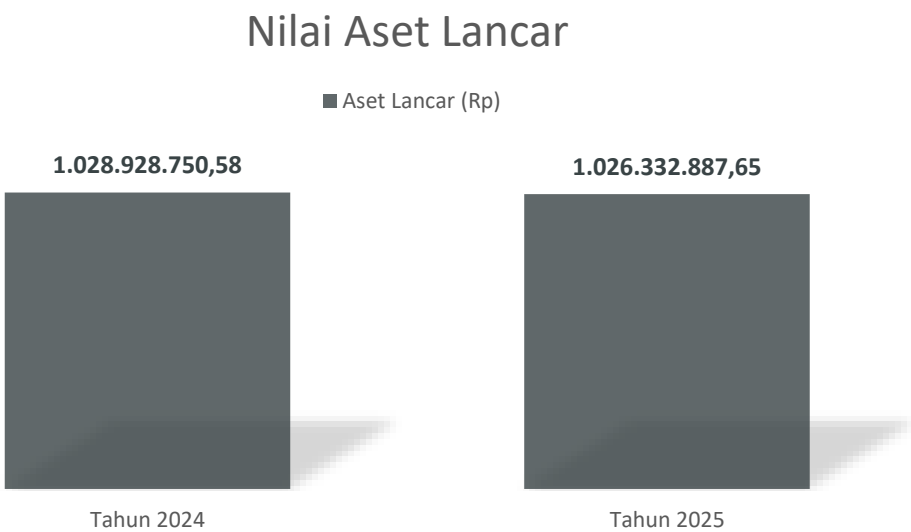
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset *lancar* jika diharapkan segera untuk direalisasikan dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa:

- a) Kas dan setara kas,
- b) Investasi jangka pendek,

- c) Piutang pajak daerah,
- d) Piutang retribusi daerah,
- e) Piutang Lainnya, dan
- f) Persediaan.

Nilai aset lancar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah:

Grafik 9 Nilai Aset Lancar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Nilai aset lancar pada OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Nilai Aset Lancar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	3.013.100,00	123.600,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	172.382,00	181.100,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	586.198.030,00	550.665.820,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.098.822,00	4.713.600,00
Biro Umum	415.557.292,65	472.826.950,58
Biro Administrasi Pimpinan	610.700,00	417.680,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	981.505,00	0,00
Jumlah	1.010.631.831,65	1.028.928.750,58

Terdapat perbedaan pada nilai aset lancar pada rekening kas di bendahara pengeluaran antara Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dikarenakan adanya pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan GU/TBP dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Perbedaan Aset Lancar pada Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025

OPD	Saldo Awal (2024)	Debit	Kredit	Kas Di Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah	22.145.706.820,00	51.050.383.543,00	591.349.787,00	72.604.740.576,00
Biro Hukum	(543.970.825,00)	129.104.665,00	1.172.966.424,00	(1.587.832.584,00)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(1.283.959.654,00)	671.691.229,00	2.100.139.079,00	(2.712.407.504,00)
Biro Organisasi	(761.298.300,00)	0,00	875.681.402,00	(1.636.979.702,00)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(1.724.775.572,00)	3.255.500.000,00	7.056.202.512,00	(5.525.478.084,00)
Biro Perekonomian dan Pembangunan	(653.241.826,00)	0,00	1.486.567.948,00	(2.139.809.774,00)
Biro Umum	(15.386.319.595,00)	8.643.247.250,00	45.327.186.202,00	(52.070.258.547,00)
Biro Administrasi Pimpinan	(1.241.243.684,00)	0,00	4.016.169.967,00	(5.257.413.651,00)
Biro Pengadaan Barang/Jasa	(550.897.364,00)	0,00	1.121.072.266,00	(1.671.969.630,00)
Jumlah	0,00	63.749.926.687,00	63.747.335.587,00	2.591.100,00

Pencatatan di atas menimbulkan adanya saldo kas pada akun Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan saldo kas negatif pada akun OPD (Biro-Biro). Di samping itu, penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini sudah melalui pengujian kas, maka nilai kas di bendahara pengeluaran yang terdapat di SIPD tidak dimasukkan ke dalam CaLK ini, karena dapat mempengaruhi nilai riil neraca Biro-Biro sebagaimana tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sisa kas sebesar Rp2.591.100,00 yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

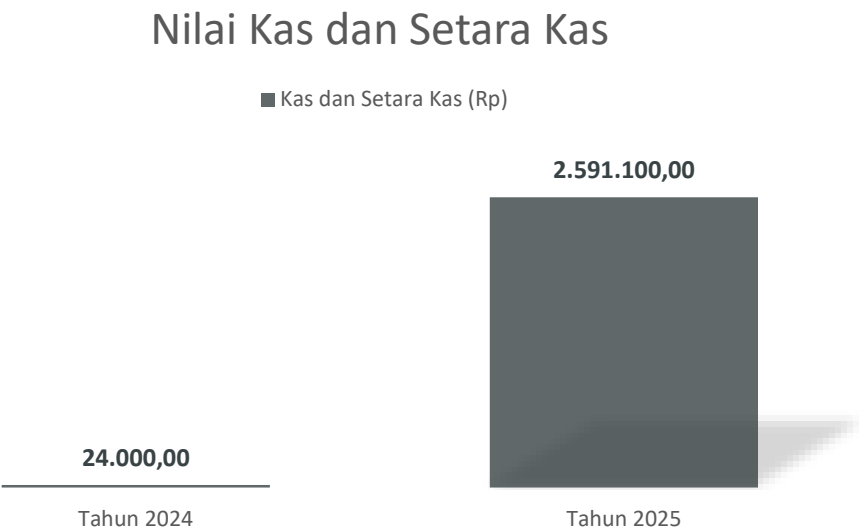
1. Kas dan Setara Kas

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat saldo pada rekening kas dan setara kas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berasal dari rekening kas di bendahara pengeluaran. Kas tersebut di atas merupakan pengembalian perjalanan dinas yang telah melewati tahun anggaran 2025 dengan keterangan TBP No 21.00/06.0/000950/TU/4.01.0.00.0.00.22.0000/M/12/2025 atas Belanja Perjalanan Dinas Biasa sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum sebesar Rp2.591.100,00 pada tanggal 18 Februari 2026, dikarenakan adanya ketidaksengajaan *double input* Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sehingga, bukti pengeluaran tersebut tidak masuk dalam pertanggungjawaban (Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melakukan *cash offname* dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai tunai Rp0, sehingga pengembalian dilakukan melewati

tahun anggaran 2025 dikarenakan ketidaktahuan bendahara atas kas/tunai yang masih tersisa).

Perbandingan saldo kas dan setara kas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

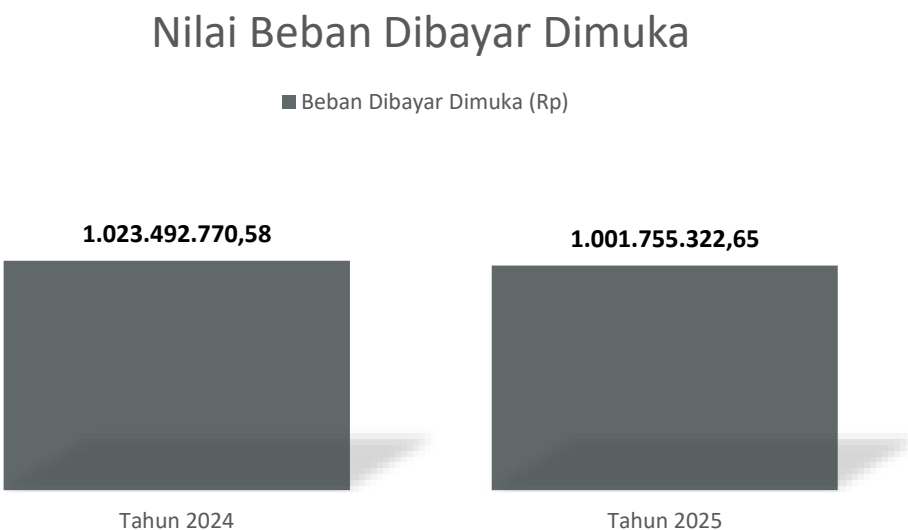
Grafik 10 Nilai Kas dan Setara Kas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



2. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengakuan atas transaksi/belanja yang diharuskan pembayaran diawal. Pada tahun 2025 *Beban Dibayar Dimuka* Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan belanja sewa gedung bangunan, sewa kendaraan bermotor, dan belanja asuransi. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 11 Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Rincian atas beban dibayar dimuka di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Uraian	Nilai (Rp)
Biro Kesejahteraan Rakyat	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan	586.198.030,00

Biro Perekonomian dan Pembangunan	427.572,00	1.353.090,00	1.838.160,00	480.000,00	4.098.822,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	384.900,00	225.800,00	0,00	610.700,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	84.915,00	265.000,00	631.590,00	0,00	981.505,00
Jumlah	800.869,00	2.308.990,00	2.695.550,00	480.000,00	6.285.409,00

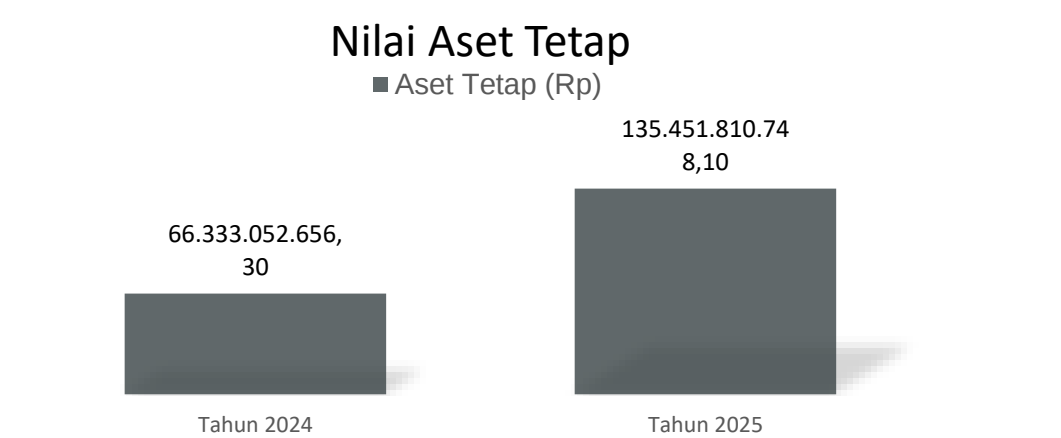
b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi *aset tetap* meliputi:

1. Tanah,
2. Peralatan dan Mesin,
3. Gedung dan Bangunan,
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan,
5. Aset Tetap Lainnya,
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan
7. Akumulasi Penyusutan.

Nilai *aset tetap* Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 13 Nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Nilai *aset tetap* di atas merupakan nilai akumulasi dari nilai yang terdapat pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Aset Tetap pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	447.162.073,70	450.921.625,58
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	481.793.668,69	605.514.965,33
Biro Organisasi	290.792.896,67	455.505.816,67

Biro Kesejahteraan Rakyat	82.342.272.675,43	7.179.084.373,57
Biro Perekonomian dan Pembangunan	145.044.335,43	281.255.798,09
Biro Umum	47.219.519.061,24	52.149.630.960,58
Biro Administrasi Pimpinan	1.892.767.322,17	2.316.992.068,29
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.632.458.714,77	2.894.147.048,19
Jumlah	135.451.810.748,10	66.333.052.656,30

1. Tanah

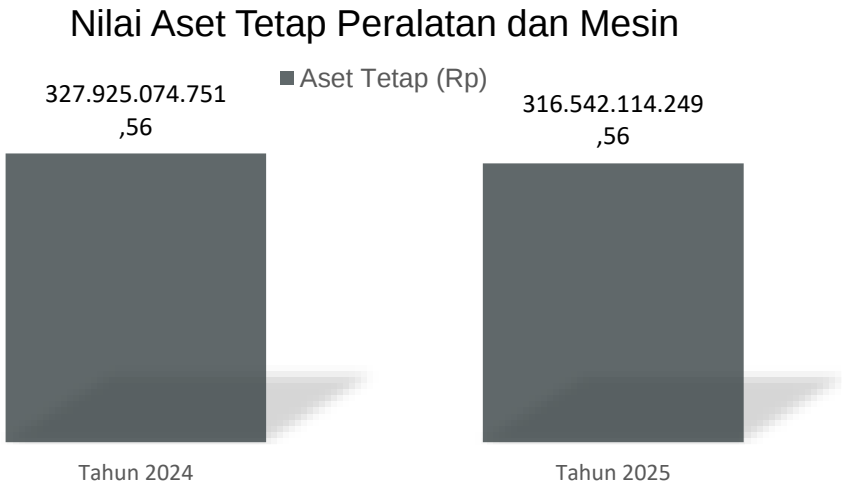
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 tidak memiliki *aset tetap tanah*.

2. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai. Terdapat penurunan nilai aset tetap peralatan dan mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebesar Rp11.382.960.502,00 dari tahun sebelumnya.

Perubahan nilai aset tersebut dipengaruhi oleh belanja modal, mutasi barang milik daerah, Reklasifikasi dari aset tetap (tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap), pelepasan aset karena hibah dan Pelepasan aset karena penghapusan barang milik daerah. Penjelasan tentang *aset tetap peralatan dan mesin* Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 14 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Nilai tersebut merupakan akumulasi dari jumlah aset tetap dari masing-masing OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Nilai Aset tetap Peralatan dan Mesin pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	2.244.882.357,00	2.182.409.807,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.034.871.355,00	4.358.171.355,00
Biro Organisasi	2.284.625.225,00	2.284.625.225,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	3.824.378.489,00	4.270.671.869,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.925.434.102,00	5.026.034.102,00
Biro Umum	282.846.211.800,00	292.634.730.416,00
Biro Administrasi Pimpinan	10.433.994.964,50	11.242.699.570,50
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.947.715.957,06	5.925.732.407,06
Jumlah	316.542.114.249,56	327.925.074.751,56

Penjelasan tentang perubahan nilai aset tetap peralatan dan mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Jurnal Perubahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Saldo Awal	Kredit (Penambahan)	Debet (Pengurangan)
Sekretariat Daerah	327.925.074.751,56		
Biro Hukum	2.182.409.807,00	62.472.550,00	0,00
Belanja Modal Mebel		9.379.500,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer		53.093.050,00	0,00
Perubahan Saldo			62.472.550,00
Saldo Akhir			2.244.882.357,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.358.171.355,00	4.390.000,00	327.690.000,00
Belanja Modal Alat Kantor		3.300.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer		670.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan		420.000,00	0,00
Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		0,00	150.450.000,00
Mutasi Keluar Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		0,00	176.150.000,00
Reklasifikasi atas pemeliharaan Peralatan Personal Computer		0,00	1.090.000,00
Perubahan Saldo			(323.300.000,00)
Saldo Akhir			4.034.871.355,00
Biro Organisasi	2.284.625.225,00	0,00	0,00
Nihil		0,00	0,00
Perubahan Saldo			0,00
Saldo Akhir			2.284.625.225,00

OPD		Saldo Awal	Kredit (Penambahan)	Debet (Pengurangan)
Biro Kesejahteraan Rakyat		4.270.671.869,00	60.051.000,00	506.344.380,00
	Belanja Modal Komputer Unit		34.410.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer		25.641.000,00	0,00
	mutasi keluar atas pelunasan utang Belanja Modal Komputer Unit		0,00	34.410.000,00
	Penghapusan Aset Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		0,00	2.200.000,00
	Penghapusan Aset Mebel		0,00	167.200.000,00
	Penghapusan Aset Alat Dapur		0,00	3.850.000,00
	Penghapusan Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		0,00	132.979.000,00
	Penghapusan Aset Lemari dan Arsip Pejabatat		0,00	54.560.000,00
	Penghapusan Aset Peralatan Studio Video dan Film		0,00	9.460.000,00
	Penghapusan Aset Alat Komunikasi Telephone		0,00	3.960.000,00
	Penghapusan Aset Alat Kedokteran Bedah		0,00	22.264.000,00
	Penghapusan Aset Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan		0,00	10.790.000,00
	Penghapusan Aset Personal Computer		0,00	46.320.480,00
	Penghapusan Aset Peralatan Personal Computer		0,00	16.370.900,00
	Penghapusan Aset Peralatan Olahraga Lainnya		0,00	1.980.000,00
Perubahan Saldo				(446.293.380,00)
Saldo Akhir				3.824.378.489,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan		5.026.034.102,00	154.834.500,00	255.434.500,00
	Belanja modal Peralatan Jaringan Komputer		4.384.500,00	0,00
	Mutasi Masuk BMD Peralatan dan Mesin dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berupa Toyota Hilux - BP 8105 A		150.450.000,00	0,00
	Mutasi Keluar BMD Peralatan dan Mesin ke Biro Umum berupa Toyota Innova - BP 1199 A BAST No 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp251.050.000,00		0,00	251.050.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin kedalam Aset Ekstrakompatabel (Reuter) pada Biro Perekonomian dan Pembangunan		0,00	4.384.500,00
Perubahan Saldo				(100.600.000,00)
Saldo Akhir				4.925.434.102,00
Biro Umum		292.634.730.416,00	6.838.616.144,00	16.627.134.760,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		1.113.100.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor		3.806.570.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		1.164.228.144,00	0,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabatat		49.728.000,00	0,00
	Belanja Modal Komputer Unit		98.300.000,00	0,00
	Belanja modal pompa		19.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin (Utang Belanja Modal)		138.500.000,00	0,00
	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST 01/BAST-BPPP/2025 berupa Tablet P.C Tanggal 26 Mei 2025		21.990.000,00	0,00
	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah berdasarkan BAST No: B/000.2.4/10/B.PEMDA/2025 (Toyota New Avanza 1.3 G - BP 1310 A) Tanggal 14 Juli 2025 pada Biro Umum		176.150.000,00	0,00
	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan BAST No.01/BAP-ASET/X/2025 (Toyota Innova - BP 1199 A) Tanggal 13 Oktober 2025 pada Biro Umum		251.050.000,00	0,00

OPD		Saldo Awal	Kredit (Penambahan)	Debet (Pengurangan)
	Pelunasan utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor tahun 2024		0,00	829.200.000,00
	Pelunasan utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor tahun 2024		0,00	283.900.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		0,00	504.860.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan - Kendaraan Bermotor Penumpang		0,00	3.543.310.549,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan - Kendaraan Bermotor Khusus		0,00	608.509.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan - Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		0,00	4.318.889.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan - Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)		0,00	165.650.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan - Kendaraan Bermotor Khusus		0,00	2.243.900.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Ekstrakompatabel - Mebel		0,00	271.428.300,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Aset Ekstrakompatabel - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		0,00	90.010.344,00
	Mutasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST No.02/ BA ST/ XII/ 2024 tanggal 27 Desember 2024 Toyota Avanza BP 1442 A		0,00	283.900.000,00
	Mutasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST No.01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7035 A, Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G BC BP 7508 A, Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7034 A, Kendaraan roda 4 KIA Pregio MT BM 1022 EP/BP 1762 A pada Biro Umum sebesar Rp2.106.416.458,00		0,00	2.106.416.458,00
	Mutasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan BAST No.04/ BA-ST/ IXI 2025 Tanggal 8 September 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1687 A pada Biro Umum sebesar Rp211.070.200,00		0,00	211.070.200,00
	Mutasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah Berdasarkan BAST Nomor: BAST 01/BA-ST/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Zenix 2.0 G CVT BP 1445 A pada Biro Umum sebesar Rp414.600.000,00		0,00	414.600.000,00
	Mutasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah Berdasarkan BAST Nomor: BAST 02/BA-ST/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2024 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1130 A pada Biro Umum sebesar Rp188.090.909,00		0,00	188.090.909,00
	Mutasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Inspektorat Daerah Berdasarkan BAST No.02/BAP-ASET/X/2025 (Kendaraan Roda 4 Toyota Fortuner 2.7 SRZ BP 1026 A) Tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp563.400.000,00		0,00	563.400.000,00
Perubahan Saldo				(9.788.518.616,00)
Saldo Akhir				282.846.211.800,00
Biro Administrasi Pimpinan		11.242.699.570,50	20.442.594,00	829.147.200,00
	Belanja Modal Alat Studio		12.045.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer		8.397.594,00	0,00
	Tunda bayar Belanja modal Alat Studio 2025		0,00	12.045.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Biro Administrasi Pimpinan		0,00	732.349.200,00

OPD	Saldo Awal	Kredit (Penambahan)	Debet (Pengurangan)
Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.103/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025			
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No. B.17/BAST/PUPP.1/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 pada Biro Kesejahteraan Rakyat		8.085.242.999,68	0,00
Perubahan Saldo			106.438.720.446,37
Saldo Akhir			114.626.845.610,37

Sedangkan rincian mengenai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	373.623.000,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	114.626.845.610,37	8.188.125.164,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00
Biro Umum	10.743.149.796,63	10.743.149.796,63
Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	2.121.021.650,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	2.510.453.750,00
Jumlah	130.375.093.807,00	23.936.373.360,63

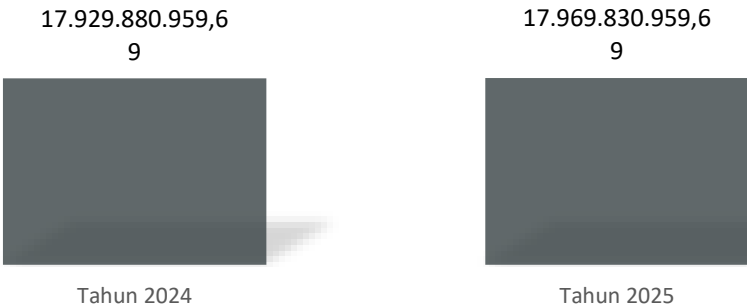
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 16 Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

■ Aset Tetap (Rp)



Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penambahan sebesar Rp39.950.000,00 berasal dari Biro Kesejahteraan Rakyat yang merupakan mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.103/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 berupa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Sedangkan rincian mengenai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	39.950.000,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	7.630.000,00
Biro Umum	16.957.200.066,00	16.957.200.066,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	965.050.893,69
Jumlah	17.969.830.959,69	17.929.880.959,69

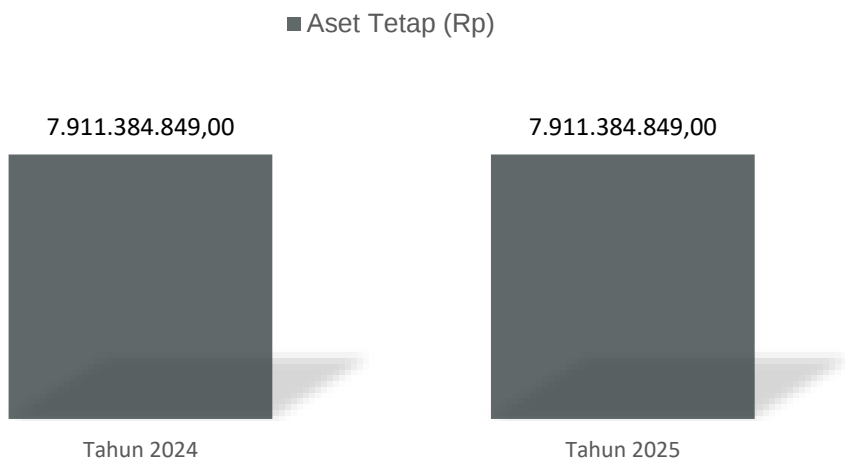
5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Sampai dengan 31 Desember 2025 nilai aset tetap lainnya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Grafik 17 Nilai Aset Tetap Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan



Selama periode tahun 2025 tidak terdapat perubahan nilai aset tetap lainnya. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari nilai aset yang dimiliki oleh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Nilai Aset Tetap Lainnya pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	248.491.270,00	248.491.270,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Organisasi	45.380.000,00	45.380.000,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	106.480.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00
Biro Umum	7.498.933.579,00	7.498.933.579,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00
Jumlah	7.911.384.849,00	7.911.384.849,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

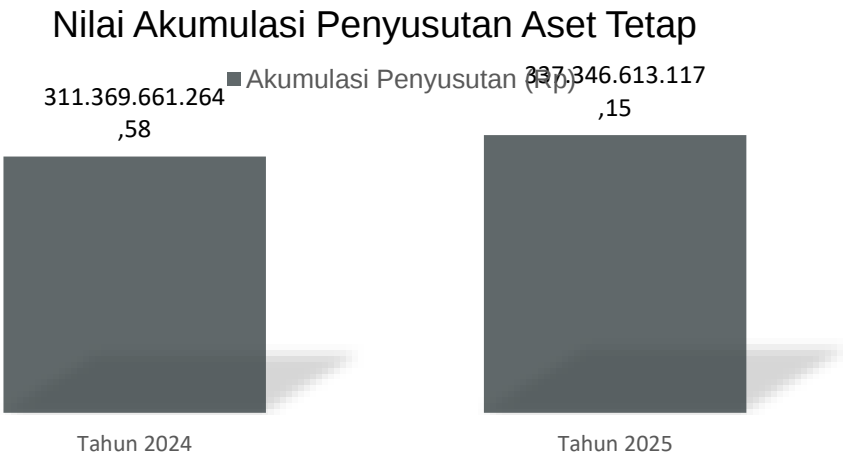
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Sampai dengan 31 Desember 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. *Akumulasi penyusutan aset tetap* Sekretariat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp25.976.951.852,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Perubahan Akumulasi Penyusutan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Kelompok Aset Tetap			Jumlah (Rp)
	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Biro Hukum	66.232.101,88	0,00	0,00	66.232.101,88
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(207.051.163,36)	7.472.460,00	0,00	(199.578.703,36)
Biro Organisasi	164.712.920,00	0,00	0,00	164.712.920,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	(162.216.232,80)	31.017.838.642,64	13.536.174,76	30.869.188.764,51
Biro Perekonomian dan Pembangunan	35.420.712,66	0,00	190.750,00	35.611.462,66
Biro Umum	(5.667.228.083,77)	214.862.995,00	593.958.372,11	(4.858.406.716,66)
Biro Administrasi Pimpinan	(426.900.292,88)	42.420.433,00		(384.479.859,88)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	203.025.749,42	50.593.227,00	30.052.907,00	283.671.883,42
Jumlah	(5.994.004.288,85)	31.333.187.757,64	637.738.203,87	25.976.951.852,57

Rincian atas perubahan nilai *akumulasi penyusutan aset tetap* pada masing-masing Biro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	2.046.211.553,30	1.979.979.451,42
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.926.700.686,31	4.126.279.389,67
Biro Organisasi	2.039.212.328,33	1.874.499.408,33

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari *aset tidak berwujud* OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Nilai Aset Tidak Berwujud pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

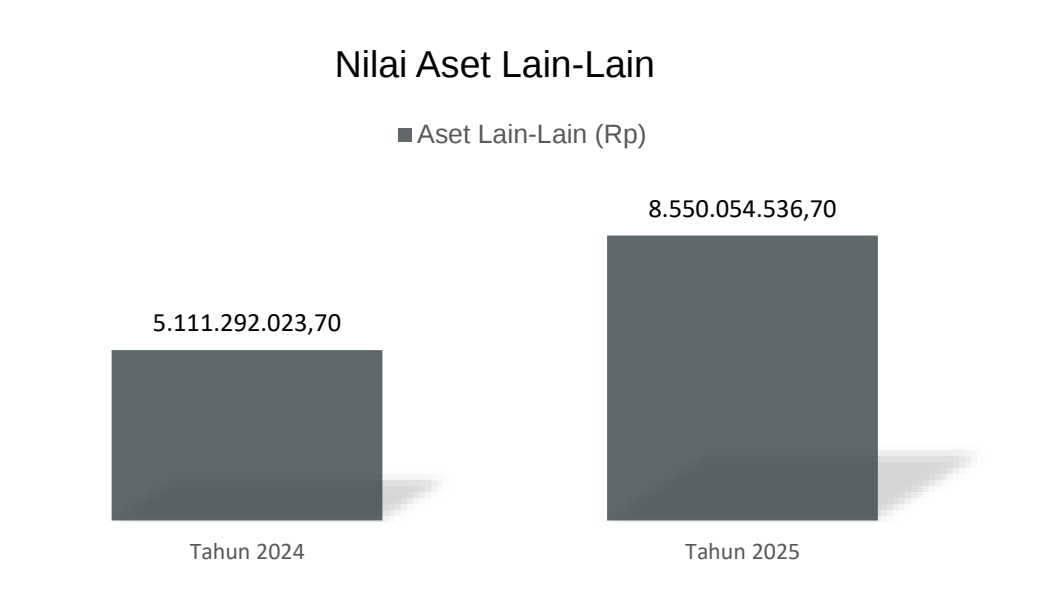
OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	49.324.000,00	49.324.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	401.788.200,00	401.788.200,00
Biro Umum	248.831.000,00	248.831.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00
Jumlah	708.643.200,00	708.643.200,00

3. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah-tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Nilai Aset Lain-Lain Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 21 Nilai Aset Lain-Lain Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Terdapat penambahan pada aset lain-lain sebesar Rp3.438.762.513,00 dari tahun sebelumnya (2024) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Perubahan Aset Lain-Lain Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Aset Lain-Lain			
OPD		Saldo Awal	
Sekretariat Daerah		5.111.292.023,70	
		Kredit (Penambahan)	Debet (Pengurangan)
Biro Hukum		769.500,00	0,00
	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Biro Hukum	0,00	769.500,00
Perubahan Saldo			(769.500,00)
Saldo Akhir			0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat		274.191.020,00	0,00
	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	3.435.500,00
Perubahan Saldo			(3.435.500,00)
Saldo Akhir			270.755.520,00
Biro Umum		2.983.577.504,00	10.779.738.189,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	504.860.000,00	
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan Kendaraan Bermotor Penumpang	3.543.310.549,00	
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan Kendaraan Bermotor Khusus	608.509.000,00	
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.318.889.000,00	
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	165.650.000,00	
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Penghapusan Kendaraan Bermotor Khusus	2.243.900.000,00	
	Penghapusan Aset Lainnya akibat pemusnahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.:1027 Tahun 2025		5.087.032.091,00
	Penghapusan Aset Lainnya akibat penjualan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.:682 Tahun 2025		2.243.900.000,00
	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-Biro Organisasi		3.358.585,00
	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-Biro Organisasi		1.000.000,00
	Mutasi Kurang Aset Lainnya merupakan Hibah Mobil Pemadam Kebakaran ke Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan BAST No. B/000.2.3.2/1125.1/BKAD-SET/2025 Tanggal 12-12-2025	(608.509.000,00)	
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (kelebihan pembayaran)	579.360,00	
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (kelebihan pembayaran)	2.549.280,00	
Perubahan Saldo			3.444.447.513,00
Saldo Akhir			6.428.025.017,00
Biro Administrasi Pimpinan		726.604.200,00	732.349.200,00
			733.829.200,00

	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4.587.000,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Mesin Ketik	17.847.500,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Reproduksi (Penggandaan)	49.115.000,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	110.211.000,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Kantor Lainnya	18.264.750,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Mebel	28.679.750,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Pendingin	9.845.000,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	259.325.000,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Kursi Kerja Pejabat	46.347.500,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Peralatan Studio Video dan Film	5.021.500,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Komunikasi Telephone	1.715.500,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Alat Komunikasi Sosial	5.199.700,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Personal Computer	135.182.500,00	0,00
	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain - Peralatan Personal Computer	39.507.500,00	0,00
	Penghapusan Aset Lainnya akibat pemusnahan SK Penghapusan Nomor 1237/KPTS-27/XI/2025, Tanggal 24 November 2025	0,00	732.349.200,00
	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	1.480.000,00
Perubahan Saldo			(1.480.000,00)
Saldo Akhir			725.124.200,00
Jumlah Akhir Perubahan Saldo			3.438.762.513,00
Saldo Akhir			8.550.054.536,70

Sedangkan saldo Aset Lain-Lain Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Saldo Aset Lain-Lain pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

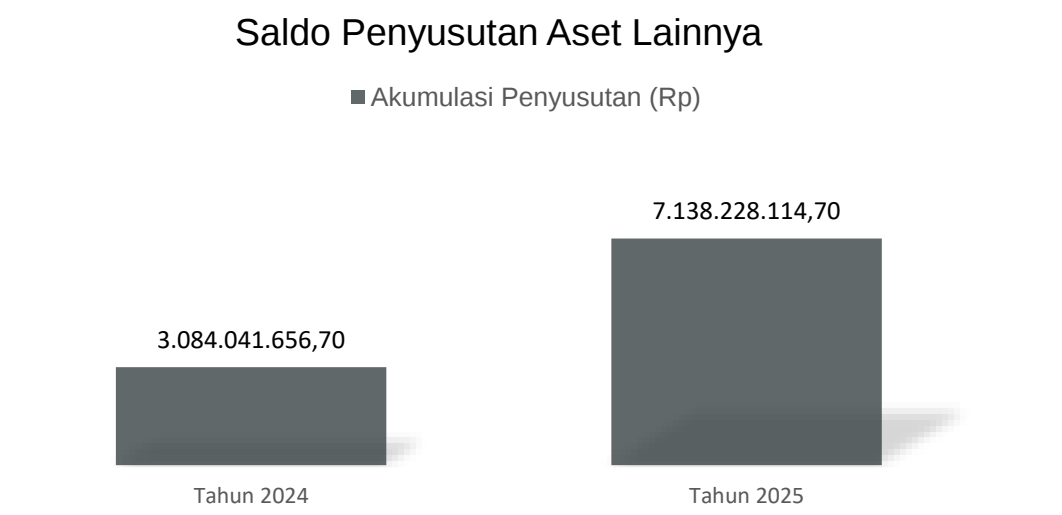
OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	769.500,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	274.191.020,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	1.126.149.799,70
Biro Umum	6.428.025.017,00	2.983.577.504,00
Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	726.604.200,00

Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Jumlah	9.155.434.896,70	5.111.292.023,70

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan penyusutan yang telah dibebankan pada aset tetap (tidak termasuk bangunan, peralatan, mesin, kendaraan) sejak aset tersebut mulai digunakan hingga tanggal tertentu. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 22 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Terdapat penambahan sebesar Rp4.054.186.458,00 pada akumulasi penyusutan aset lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan selama tahun 2025 bila dibandingkan denga tahun sebelumnya (2024) yang berasal dari Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Uraian	Kredit (Penambahan)	Debet (Pengurangan)
Biro Umum	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	11.385.118.549,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	2.243.900.000,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	5.087.032.091,00
Jumlah Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan		11.385.118.549,00	7.330.932.091,00
Jumlah Akhir Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan			4.054.186.458,00

Sedangkan saldo akumulasi penyusutan aset lainnya pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	270.755.520,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.100.817.845,70	1.100.817.845,70
Biro Umum	5.238.196.717,00	1.184.010.259,00
Biro Administrasi Pimpinan	528.458.032,00	528.458.032,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Jumlah	7.138.228.114,70	3.084.041.656,70

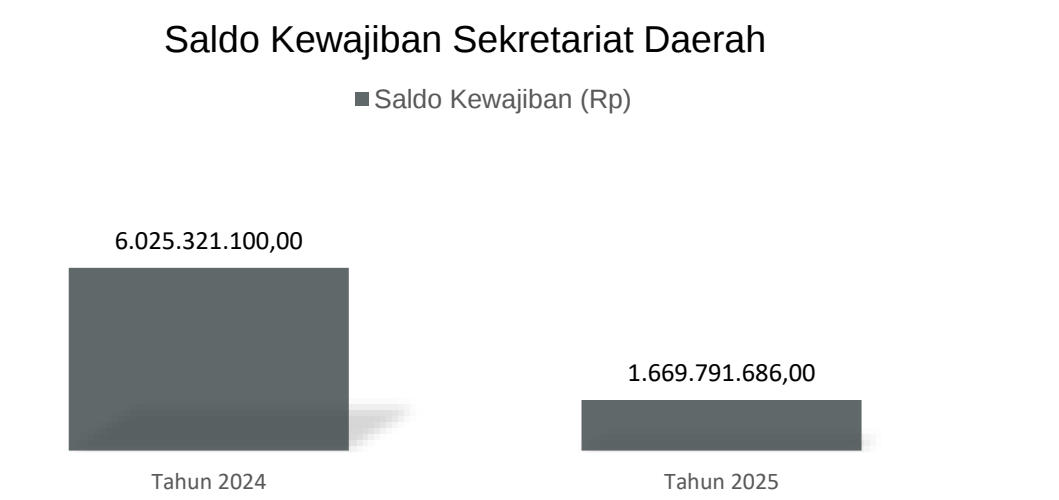
3.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kewajiban Jangka Panjang, dan
- b. Kewajiban Jangka Pendek.
 - 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan
 - 2. Utang Belanja.

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban yang timbul akibat adanya utang belanja pada tahun 2025. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Grafik 23 Saldo Kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Jumlah kewajiban masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Jumlah Kewajiban pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	234.707.100,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	34.410.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00
Biro Umum	1.669.791.686,00	5.600.300.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	155.904.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00
Jumlah	1.669.791.686,00	6.025.321.100,00

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.669.791.686,00 berupa utang belanja akibat tunda bayar.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongn yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki utang PFK.

2. Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul karena pembelian barang atau jasa yang telah diterima, namun belum dibayar atau dilunasi. Rincian utang belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Utang Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

No	Nama Sub Kegiatan	Uraian Utang Belanja	Nilai Utang (Rp)
Belanja Barang dan Jasa			
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Supir	54.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	367.880.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.079.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	251.644.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	157.585.567,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	177.675.852,00
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	149.312.205,00
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	61.891.915,00
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	51.363.347,00
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.966.000,00
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.920.000,00
12	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.473.800,00
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	49.500.000,00
Sub-Jumlah			1.531.291.686,00
Belanja Modal			
1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Pendingin	138.500.000
Sub-Jumlah			138.500.000
Jumlah			1.669.791.686,00

3.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2025 adalah

sebesar Rp136.937.321.571,75. Rincian lebih lanjut disajikan pada sub bab Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri dari:

- 1. Pendapatan-LO,
- 2. Beban,
- 3. Defisit Non Operasional-LO, dan
- 4. Surplus/Defisit-LO.

Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat sebagai defisit-LO yang timbul akibat adanya beban operasional, tetapi tidak memiliki pendapatan-LO sehingga beban operasional lebih besar dari pendapatan-LO. Rincian atas Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Laporan Operasional				
Kegiatan Operasional				
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0%
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0%

Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0%
BEBAN	266.700.756.904,35	371.921.454.362,38	(105.220.697.458,03)	-28,29%
Beban Pegawai	85.966.333.404,00	74.113.808.923,00	11.852.524.481,00	15,99%
Beban Barang dan Jasa	109.256.698.121,98	170.119.448.376,76	(60.862.750.254,78)	-35,78%
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Hibah	58.930.662.063,00	116.938.132.922,00	(58.007.470.859,00)	-49,61%
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.234.832.334,84	9.776.886.172,62	(542.053.837,78)	-5,54%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.607.886.027,50	307.876.655,00	2.300.009.372,50	747,06%
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	625.200.779,11	665.301.313,00	(40.100.533,89)	-6,03%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	79.144.173,92	0,00	79.144.173,92	100%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0%
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(266.700.756.904,35)	(371.921.454.362,38)	(105.220.697.458,03)	28,29%
Kegiatan non operasional				
Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	8.619.968.671,00	297.675.000,00	8.322.293.671,00	2795,77%
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(8.619.968.671,00)	(297.675.000,00)	(8.322.293.671,00)	-2795,77%
Surplus/Defisit-LO	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)	(96.898.403.787,03)	-26,03%

Terdapat selisih antara Saldo Laporan Operasional pada laporan ini dengan SIPD dikarenakan adanya jurnal pada rekening Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO yang tidak tercatat pada akun OPD dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar (Rp8.619.968.671,00). Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Tabel Selisih Saldo LO

Uraian	CaLK (Rp)	SIPD (Rp)	Selisih (Rp)
Laporan Operasional Tahun 2024	(372.219.129.362,38)	(371.921.454.362,38)	(297.675.000,00)
Laporan Operasional Tahun 2025	(275.320.725.575,35)	(266.700.756.904,35)	(8.619.968.671,00)

Nilai LO tersebut merupakan akumulasi dari saldo masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Laporan Operasional pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	(1.535.317.920,88)	(3.020.589.503,42)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(2.720.665.960,97)	(4.207.931.804,67)
Biro Organisasi	(1.045.976.290,00)	(1.766.466.710,33)
Biro Kesejahteraan Rakyat	(75.066.333.404,70)	(152.134.134.612,45)
Biro Perekonomian dan Pembangunan	(1.715.744.111,71)	(3.247.578.448,71)
Biro Umum	(184.553.628.589,93)	(193.068.623.003,13)
Biro Administrasi Pimpinan	(7.053.234.840,14)	(12.213.311.722,61)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	(1.629.824.457,02)	(2.560.493.557,06)
Jumlah	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)

Perbedaan antara Belanja Operasional pada LRA dan LO tahun 2025 yang merupakan transaksi/jurnal pembentuk Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Selisih LRA dan LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian	LRA Tahun 2025 (Rp)	LO Tahun 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Pegawai	85.974.425.022,00	85.966.333.404,00	(8.091.618,00)
Belanja Barang dan Jasa	107.726.909.451,05	109.256.698.121,98	1.529.788.670,93
Belanja Hibah	62.809.353.063,00	58.930.662.063,00	(3.878.691.000,00)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan	0,00	12.547.063.315,37	12.547.063.315,37
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	8.619.968.671,00	8.619.968.671,00
Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	256.510.687.536,05	(275.320.725.575,35)	18.810.038.039,30

Rincian transaksi pembentuk Laporan Operasional (LO) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penambah Beban LO, antara lain:

1. Nilai persediaan barang tahun lalu yang merupakan sisa barang pakai habis belum dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.411.980,00.
2. Beban dibayar dimuka pada tahun sebelumnya (2024) yang merupakan beban sewa sebesar Rp1.023.492.770,58.
3. Utang belanja barang dan jasa tahun berjalan sebesar Rp1.471.817.886,00.
4. Reklasifikasi dari aset tetap ke barang dan jasa karena tidak memenuhi kriteria aset tetap tahun berjalan sebesar Rp518.002.444,00.
5. Reklasifikasi dari aset tetap kedalam aset ekstrakompatabel sebesar Rp4.384.500,00.
6. Beban penyusutan dan amortisasi tahun berjalan (sampai dengan 31 Desember 2025) sebesar Rp12.547.063.315,37.
7. Beban Defisit Penjualan Aset Non Lancar atas pelepasan aset yang berasal dari hibah ke Pemerintah Daerah Lain dan pelepasan aset dari penghapusan karena rusak berat/usang sebesar Rp9.228.477.671,00.

b. Faktor Pengurang Beban LO

1. Nilai persediaan barang tahun berjalan yang merupakan sisa barang pakai habis belum dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.285.409,00.
2. Pelunasan utang belanja barang dan jasa tahun lalu (2024) sebesar Rp378.542.100,00.
3. Reklasifikasi dari persediaan barang ke belanja barang dan Jasa (sewa peralatan cetak) sebesar Rp96.000.000,00.
4. Beban dibayar dimuka tahun berjalan yang merupakan beban sewa kendaraan dan gedung bangunan sebesar Rp5.488.955.322,65.
5. Kelebihan atas pembayaran belanja tahun berjalan yang menjadi pendapatan lain-lain yang sah, mengurangi beban operasi dan dimasukkan ke dalam aset lain-lain sebesar Rp18.829.696,00.

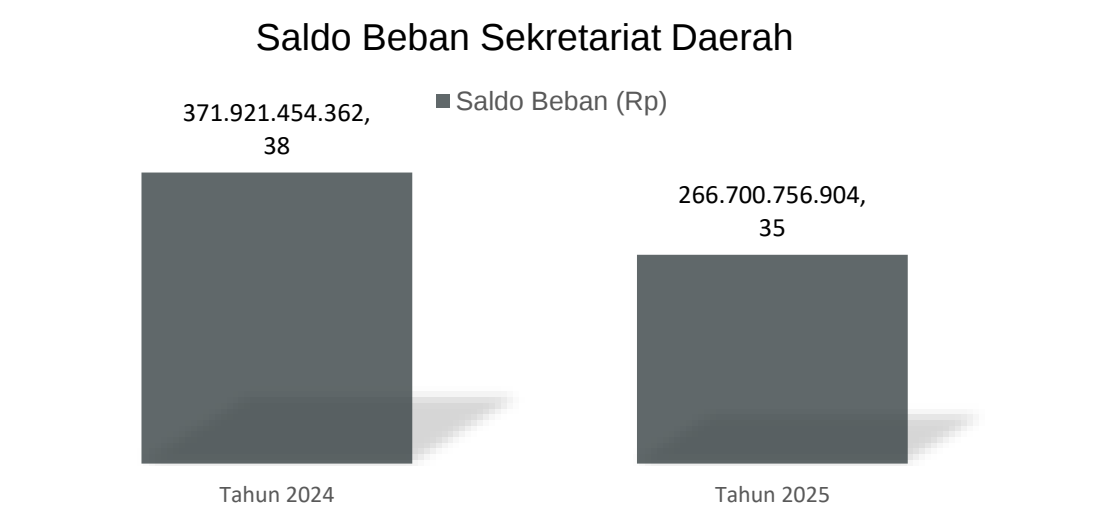
3.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki Pendapatan-LO.

3.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dalam hal ini beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, dan beban penyusutan dan amortisasi. Beban operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 24 Saldo Beban Operasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



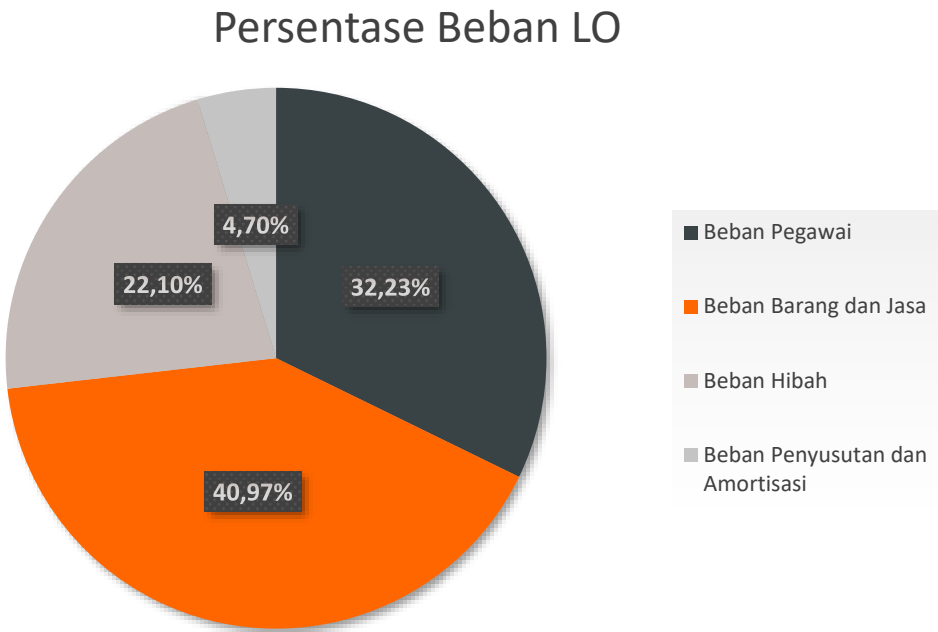
Jumlah beban merupakan akumulasi dari nilai beban yang terdapat pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Saldo Beban Operasi pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	1.535.317.920,88	3.020.589.503,42
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.720.665.960,97	4.207.931.804,67
Biro Organisasi	1.045.976.290,00	1.766.466.710,33
Biro Kesejahteraan Rakyat	74.594.399.024,70	152.134.134.612,45
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.715.744.111,71	3.247.578.448,71
Biro Umum	177.222.696.498,93	192.770.948.003,13
Biro Administrasi Pimpinan	6.236.132.640,14	12.213.311.722,61
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.629.824.457,02	2.560.493.557,06
Jumlah	266.700.756.904,35	371.921.454.362,38

Beban barang dan jasa merupakan rekening beban tertinggi dalam beban LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 yaitu sebesar 40,97% dari seluruh nilai beban LO, bila dibandingkan dengan beban pegawai, beban hibah, dan beban penyusutan dan amortisasi. Persentase perbandingan beban LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 25 Persentase Perbandingan Beban LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



3.3.3 Defisit Non Operasional-LO

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional di antaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Pada tahun 2025 terdapat saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp8.619.968.671,00 berupa penghapusan barang milik daerah.

Rincian atas nilai saldo di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Defisit Non-Operasional-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
Biro Kesejahteraan Rakyat	Penghapusan Aset Tetap peralatan dan mesin berdasarkan SK Penghapusan No.1372/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 25 Agustus 2025	471.934.380,00
Biro Umum	Penghapusan Aset Lainnya akibat pemusnahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.: 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025	5.087.032.091,00
	Penghapusan Aset Lainnya akibat penjualan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.: 682 Tahun 2025, Tanggal 4 Juni 2025	2.243.900.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan	84.753.000,00
	Penghapusan Aset Lainnya akibat pemusnahan SK Penghapusan Nomor	732.349.200,00

	1237/KPTS-27/XI/2025, Tanggal 24 November 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan	
Jumlah		8.619.968.671,00

3.3.4 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengalami defisit-LO dikarenakan adanya beban pada LO dan tidak adanya pendapatan-LO, sehingga beban-LO lebih besar daripada pendapatan.

Tabel 52 Defisit-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Pendapatan-LO	0,00	0,00
Beban	266.700.756.904,35	371.921.454.362,38
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	8.619.968.671,00	297.675.000,00
Surplus/Defisit-LO	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi pada rekening:

1. Ekuitas Awal,
2. Surplus/Defisit-LO,
3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan,
4. Koreksi Ekuitas Lainnya, dan
5. Ekuitas Akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	64.081.053.873,88	70.132.356.075,49
Surplus/Defisit-Lo	(275.320.725.575,35)	(372.219.129.362,38)
RK PPKD	262.927.885.389,05	368.677.964.441,23
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		

Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain	85.249.107.884,17	(2.510.137.280,46)
EKUITAS AKHIR	136.937.321.571,75	64.081.053.873,88

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari saldo ekuitas masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Saldo Laporan Perubahan Ekuitas pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

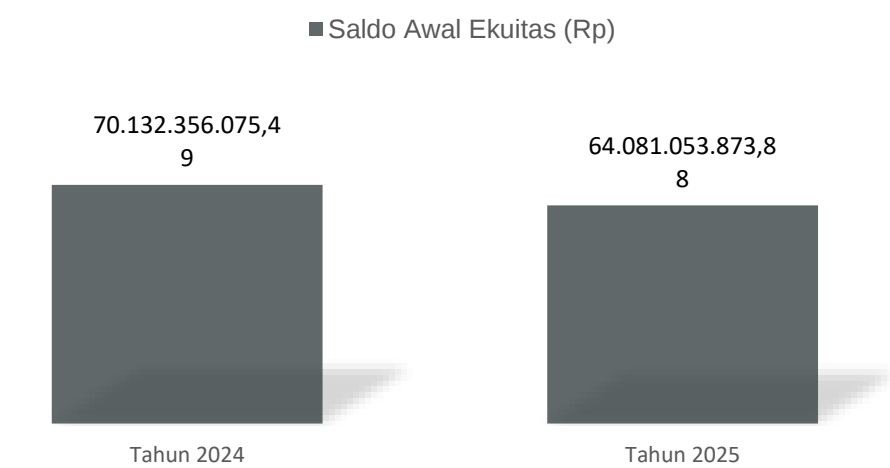
OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	499.499.173,70	266.431.625,58
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	481.966.050,69	605.696.065,33
Biro Organisasi	299.292.896,67	464.005.816,67
Biro Kesejahteraan Rakyat	82.930.716.705,43	7.698.775.693,57
Biro Perekonomian dan Pembangunan	576.263.311,43	713.089.552,09
Biro Umum	47.416.172.023,89	49.070.556.156,16
Biro Administrasi Pimpinan	2.091.271.190,17	2.359.651.916,29
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.642.140.219,77	2.902.847.048,19
Jumlah	136.937.321.571,75	64.081.053.873,88

3.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya. Saldo ekuitas awal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 26 Saldo Ekuitas Awal Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Saldo Awal LPE Sekretariat Daerah



Saldo awal tahun 2025 pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Saldo Ekuitas Awal pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	266.431.625,58	397.817.032,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	605.696.065,33	601.429.839,00
Biro Organisasi	464.005.816,67	342.902.635,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	7.698.775.693,57	7.942.191.215,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	713.089.552,09	909.784.397,00
Biro Umum	49.070.556.156,16	53.930.912.743,74
Biro Administrasi Pimpinan	2.359.651.916,29	2.829.127.874,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.902.847.048,19	3.178.190.339,75
Jumlah	64.081.053.873,88	70.132.356.075,49

3.4.2 Surplus/Defisit-LO

Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 mengalami defisit-LO sebesar (Rp275.320.725.575,35) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 3.3. Laporan Operasional (LO), poin 3.3.4. penjelasan Surplus/Defisit-LO di atas.

3.4.3 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rincian atas kewajiban untuk dikonsolidasikan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	
Penerimaan SP2D	
SP2D UP	6.260.000.000,00
SP2D GU	45.360.383.543,00
SP2D TU	12.696.952.044,00
SP2D LS	200.089.382.939,05
Jumlah SP2D	264.406.718.526,05
Penyetoran Kas ke Kas Daerah	
STS (Surat Tanda Setoran)	45.305.666,00
UP Nihil	1.161.349.787,00
Koreksi Belanja	262.134.099,00
Jumlah Pengurangan	1.468.789.552,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	262.937.928.974,05

Rincian penerimaan SP2D masing-masing OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Penerimaan SP2D pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

OPD	Penerimaan SP2D (Rp)				Jumlah (Rp)
	SP2D UP	SP2D GU	SP2D TU	SP2D LS	
Biro Hukum	150.000.000,00	920.863.995,00	126.513.565,00	598.041.102,00	1.795.418.662,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	300.000.000,00	1.332.534.511,00	671.691.229,00	498.593.340,00	2.802.819.080,00
Biro Organisasi	130.000.000,00	875.681.402,00	0,00	5.581.968,00	1.011.263.370,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	650.000.000,00	3.154.352.206,00	3.255.500.000,00	65.296.799.262,00	72.356.651.468,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	200.000.000,00	1.357.330.308,00	0,00	92.400.000,00	1.649.730.308,00
Biro Umum	4.000.000.000,00	32.686.057.590,00	8.643.247.250,00	131.377.755.970,05	176.707.060.810,05
Biro Administrasi Pimpinan	650.000.000,00	3.948.199.110,00	0,00	1.983.883.747,00	6.582.082.857,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	180.000.000,00	1.085.364.421,00	0,00	236.327.550,00	1.501.691.971,00
Jumlah	6.260.000.000,00	45.360.383.543,00	12.696.952.044,00	200.089.382.939,05	264.406.718.526,05

Penyetoran ke kas daerah melalui STS (Surat Tanda Setoran) dan UP nihil mencapai Rp1.206.655.453,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Pengembalian melalui STS Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian	Nomor Bukti	Tanggal	Jumlah (Rp)
Biro Hukum			1.852.557,00
Pengembalian Sisa Tu.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	21.00/07.0/000028/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	1.852.557,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			1.267.624,00
STS TU.1 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha Swast	21.00/07.0/000020/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/PPR2/11/2025	28 November 2025	1.267.624,00
Biro Kesejahteraan Rakyat			11.494.324,00
Pengembalian TU. 1 Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	21.00/07.0/000007/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/P3/6/2025	17 Juni 2025	9.740.000,00
PENGEMBALIAN TU. 2 SUB KEGIATAN Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	21.00/07.0/000009/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025	25 Juli 2025	1.062.535,00
Pengembalian TU. 3 Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	21.00/07.0/000012/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/P4/9/2025	22 September 2025	384.155,00
Pengembalian TU. 4 Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	21.00/07.0/000015/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/PR/11/2025	10 November 2025	307.634,00
Biro Umum			30.691.161,00
Pengembalian Sisa TU. 1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.00/07.0/000002/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/P3/4/2025	17 April 2025	47.800,00
Pengembalian Sisa TU. 2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.00/07.0/000004/TU/4.0 1.0.00.0.00.22.0000/P3/6/2025	05 Juni 2025	1.147.200,00

Pengembalian Sisa TU. 4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.00/07.0/000014/TU/4.01.0.00.0.00.22.0000/PR/10/2025	24 September 2025	2.000,00
Pengembalian Sisa TU. 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.00/07.0/000021/TU/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR2/12/2025	03 Desember 2025	96.418,00
Pengembalian Sisa TU.1 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	21.00/07.0/000030/TU/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	29.397.743,00
Jumlah			45.305.666,00

Tabel 59 Rincian Pengembalian UP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Nomor Bukti	Tanggal	Jumlah (Rp)	Pengembalian UP Ke bendahara Pengeluaran
Biro Hukum	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	4.411.136,00	20.000.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	204.086.661,00	0,00
Biro Organisasi	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	130.000.000,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	0,00	3.649.694,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	21.00/06.0/000005/UP/NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	17 December 2026	55.000.000,00	0,00
	21.00/06.0/000005/UP/NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	30 December 2026	15.762.360,00	0,00
Biro Umum	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	31 Desember 2025	2.118.638,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	18 December 2025	500.000.000,00	0,00
	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	30 December 2025	82.029.143,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	21.00/06.0/000005/UP-NIHIL/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	17 December 2025	143.000.000,00	1.292.155,00
Jumlah			1.136.407.938,00	24.941.849,00
Jumlah Keseluruhan				1.161.349.787,00

Tabel 60 Koreksi Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Biro Hukum		528.828,00
1	Koreksi Pengembalian Belanja Natura dan Pakan Natura	528.828,00
Biro Kesejahteraan Rakyat		252.533.025,00
1	Koreksi Pengembalian Belanja Hibah Uang Tahap II Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk Kegiatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang T.A 2025	85.714.300,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Koreksi Pengembalian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk Kegiatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang T.A 2025	52.317.250,00
3	Koreksi Pengembalian Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat (insentif1Keagamaan1se-Prov. Kepri Kabupaten Karimun a.n. Muhammad Rasid Lubis dkk)	6.650.000,00
4	Koreksi Pengembalian Belanja Penerima Bantuan Insentif Guru PAUD pada Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau an. INNI YANA S.PD.AUD dkk, Tahun Anggaran 2025	1.900.000,00
5	Koreksi Pengembalian Belanja Hibah Uang Tahap II Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Kegiatan Operasional dan Kegiatan LPTQ Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025	98.301.475,00
6	Koreksi Pengembalian Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat (insentif keagamaan se-Prov Kepri Kota batam) an Zumaroh dkk	1.425.000,00
7	Koreksi Pengembalian Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat (Insentif Keagamaan se-prov. Kepri Kab. Kepulauan Anambas a.n. Idris dkk) Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	475.000,00
8	Koreksi Pengembalian Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat (Insentif Keagamaan se-prov. Kepri Kota Tanjungpinang a.n. Wasita Anarum dkk) Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.850.000,00
9	Koreksi Pengembalian Belanja Beasiswa Jenjang Pendidikan Tinggi Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau an Ilda Kurnia dkk	2.500.000,00
10	Koreksi Pengembalian Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Beasiswa Jenjang Pendidikan Tinggi Dalam Negeri	400.000,00
Biro Umum		9.072.246,00
1	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Juli an. Nur Budiono	256.288,00
2	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan September an. Nur Budiono	256.288,00
3	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Oktober an. Nur Budiono	256.288,00
4	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan November an. Nur Budiono	256.288,00
5	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Agustus an. Nur Budiono	256.288,00
6	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Juni an. Nur Budiono	256.288,00
7	Koreksi Pengembalian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.373.065,00
8	Koreksi Pengembalian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.317.932,00
9	Koreksi Pengembalian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.317.289,00
10	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Juni PPPK an. DWI RATNA PUSPITASARI	256.288,00
11	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Juli Gaji PPPK an. RENI MARIA	228.704,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
12	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Juli Gaji PPPK an. DWI RATNA PUSPITASARI	256.288,00
13	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga Bulan Juni Gaji PPPK an. RENI MARIA	228.704,00
14	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Maret an. NURDENA NINGSIH	72.420,00
15	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Maret an. NURDENA NINGSIH	77.570,00
16	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Januari an. YUDHA AL FASHAR	72.420,00
17	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Februari an. YUDHA AL FASHAR	72.420,00
18	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Februari an. YUDHA AL FASHAR	77.570,00
19	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Januari an. YUDHA AL FASHAR	55.714,00
20	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Februari an. YUDHA AL FASHAR	72.420,00
21	Koreksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Bulan Februari an. YUDHA AL FASHAR	55.714,00
Jumlah		262.134.099,00

Selisih antara RK PPKD LPE dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan disebabkan oleh adanya pengembalian atas temuan oleh BPK pada beberapa OPD, yaitu:

Tabel 61 Pengembalian Temuan BPK tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
Biro Hukum		769.500,00
1	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Biro Hukum. Nomor: 21.00/41.0/000530/STBP/5.02.0.00.0.00.25.0000/10/2025	769.500,00
Biro Kesejahteraan Rakyat		3.435.500,00
1	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Biro Kesejahteraan Rakyat. Nomor: 21.00/41.0/000520/STBP/5.02.0.00.0.00.25.0000/10/2025	3.435.500,00
Biro Umum		4.358.585,00
1	Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-Biro Organisasi. Nomor: 21.00/41.0/000605/STBP/5.02.0.00.0.00.25.0000/10/2025	3.358.585,00
2	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-Biro Organisasi. Nomor: 21.00/41.0/000486/STBP/5.02.0.00.0.00.25.0000/10/2025	1.000.000,00
Biro Administrasi Pimpinan		1.480.000,00

1	Pengembalian Temuan BPK Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Biro Administrasi Pimpinan. Nomor: 21.00/41.0/000531/STBP/5.02.0.00.0.00.25.0000/10/2025	1.480.000,00
Jumlah		10.043.585,00

3.4.4 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi ekuitas lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tercatat sebesar Rp98.094.917.494,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Koreksi Ekuitas masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Biro Hukum	0,00	1,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	(20,67)	7,00
Biro Organisasi	0,00	1,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	78.212.735.491,56	(19,98)
Biro Perekonomian dan Pembangunan	(50.076,95)	39,80
Biro Umum	6.238.424.277,61	(2.510.137.346,68)
Biro Administrasi Pimpinan	786.280.400,02	39,90
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	11.717.812,60	(2,50)
Jumlah	85.249.107.884,17	(2.510.137.280,46)

Rincian saldo koreksi ekuitas pada masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Rincian Koreksi Ekuitas pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

OPD	Uraian	Kredit (Rp) (Penambahan)	Debit (Rp) (Pengurangan)
Biro Hukum	<i>Nihil</i>	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	150.450.000,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	176.150.000,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	20,67
	Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	150.450.000,00

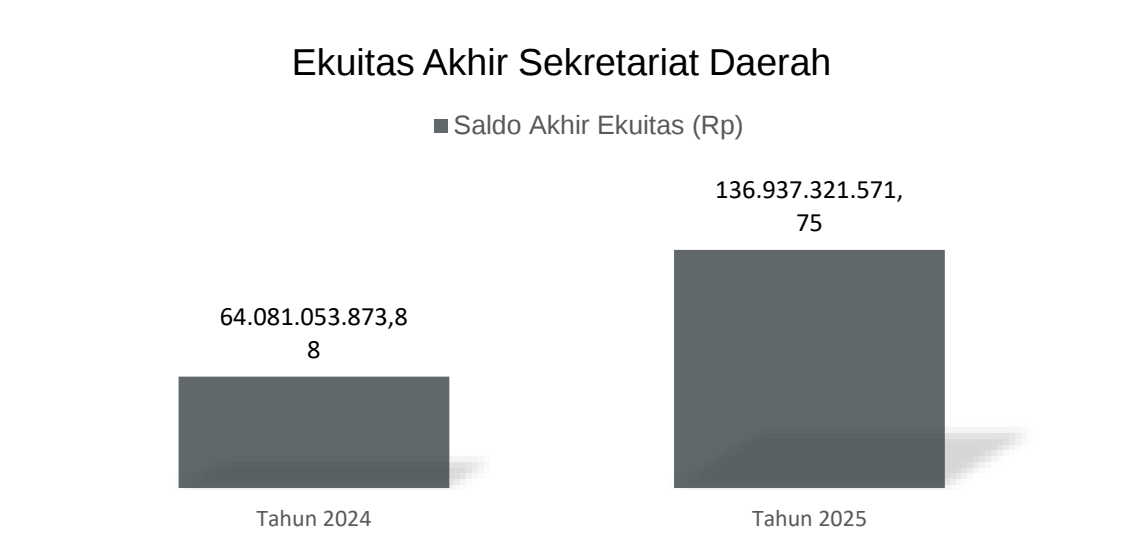
OPD	Uraian	Kredit (Rp) (Penambahan)	Debit (Rp) (Pengurangan)
	Mutasi Keluar Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	176.150.000,00
Biro Organisasi	<i>Nihil</i>	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	8.085.242.999,68	0,00
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	98.353.477.446,69	0,00
	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	39.950.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,00	12.567.604,67
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (koreksi ekuitas lain-lain)	471.934.380,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,00	444.688.365,00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,00	28.280.613.365,14
Biro Perekonomian dan Pembangunan	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,00	50.076,95
	Mutasi Keluar BMD Peralatan dan Mesin ke Biro Umum berupa Toyota Innova - BP 1199 A	0,00	251.050.000,00
	Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan akibat Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Pemerintahan	150.450.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,00	150.450.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	251.050.000,00	0,00
Biro Umum	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		1.233.861.109,00
	Kendaraan Bermotor Penumpang		2.106.416.458,00
	Personal Computer	21.990.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.225.779.753,61	0,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	7.330.932.091,00	0,00

OPD	Uraian	Kredit (Rp) (Penambahan)	Debit (Rp) (Pengurangan)
Biro Administrasi Pimpinan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	721.107.400,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	84.753.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,00	19.579.999,98
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Biro Pengadaan Barang/Jasa	11.717.812,60	0,00
Jumlah Perubahan		118.074.984.883,58	32.825.876.999,41
Jumlah Koreksi Ekuitas			85.249.107.884,17

3.4.5Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Ekuitas Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 27 Ekuitas Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Biro Organisasi	299.292.896,67	464.005.816,67
Biro Kesejahteraan Rakyat	82.930.716.705,43	7.698.775.693,57
Biro Perekonomian dan Pembangunan	576.263.311,43	713.089.552,09
Biro Umum	47.416.172.023,89	49.070.556.156,16
Biro Administrasi Pimpinan	2.091.271.190,17	2.359.651.916,29
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.642.140.219,77	2.902.847.048,19
Jumlah	136.937.321.571,75	64.081.053.873,88

Ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Ekuitas awal	64.081.053.873,88
- Defisit-LO	(275.320.725.575,35)
- RK PPKD	262.927.885.389,05
- Koreksi ekuitas lainnya	+ 85.249.107.884,17
Ekuitas akhir Tahun 2025	Rp136.937.321.571,75
- Jumlah aset lancar	1.026.332.887,65
- Jumlah aset tetap	135.451.810.748,10
- Jumlah aset lainnya	2.128.969.622,00
- Jumlah kewajiban	+ (1.669.791.686,00)
Ekuitas Neraca Tahun 2025	Rp136.937.321.571,75

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan Entitas Akuntansi dengan identitas sebagai berikut:

Nama Entitas Akuntansi : Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak,
Pulau Dompak Seri Darul Makmur –
Tanjungpinang.
Sekretaris Daerah : Misni, S.K.M., M.Si.

Sebagai entitas akuntansi, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari entitas yang membentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai entitas pelaporan dan akuntansi.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

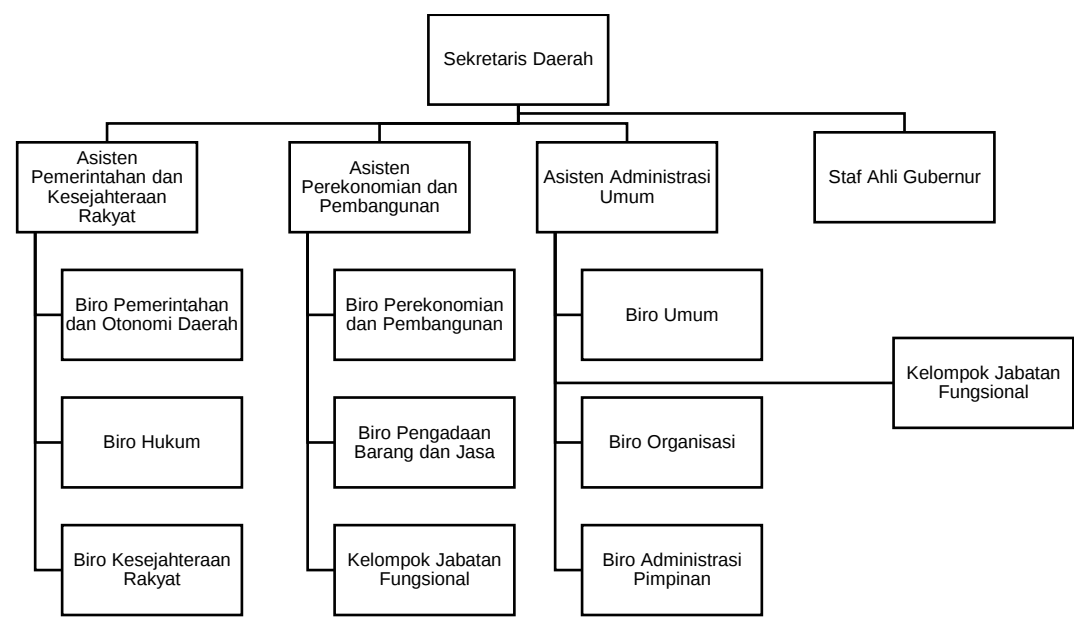
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1. Sekretaris Daerah;
- 2. Staf Ahli;
- 3. Asisten Sekretaris Daerah;

- 4. Biro;
- 5. Bagian;
- 6. Sub Bagian; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.



4.3 Tugas dan Fungsi

4.3.1 Staf Ahli

Staf ahli mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:

- 1) Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya; dan
- 2) Mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum

Untuk menyelenggarakan tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan kegiatan/fasilitasi penyusunan dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah;
- 2) Melaksanakan analisis kajian terkait isu-isu strategis;

- 3) Melaksanakan monitoring dan koordinasi permasalahan spesifik tertentu terkait kebijakan pemerintah dan isu strategis;
- 4) Melaksanakan konsultasi ke lembaga terkait;
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintah dan Hukum; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Untuk menyelenggarakan tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan analisis dan kajian terhadap pelaksanaan aturan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 2) Melaksanakan analisis dan kajian terhadap isu-isu strategis yang muncul;
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terhadap *issue*, permasalahan serta hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melaksanakan konsultasi ke lembaga terkait;
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

c. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan kegiatan/fasilitasi penyusunan dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan bidang sosial, kesejahteraan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Melaksanakan analisis kajian terkait isu-isu Strategis;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan intelektual kehidupan umat beragama terutama sumber daya manusia pada bidang pendidikan keagamaan;
- 4) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi serta evaluasi pada instansi terkait yang menangani urusan sosial kemasyarakatan;
- 5) Melaksanakan konsultasi ke lembaga terkait;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang sosial, kesejahteraan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

4.3.2 Asisten Sekretaris Daerah

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

- a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Biro Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;
- 3) Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

- a. Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
- b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan administrasi pimpinan;
- 6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi:

- a. Biro Organisasi;
- b. Biro Umum; dan
- c. Biro Administrasi Pimpinan.

4.3.3 Biro

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- 2) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- 3) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;

- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibu kota;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
- 8) Penyiapan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
- 9) Penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
- 10) Penyiapan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota;
- 11) Penyiapan bahan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing;
- 12) Penyiapan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 13) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 14) Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- 15) Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 16) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- 17) Pelaksanaan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- 18) Pelaksanaan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;

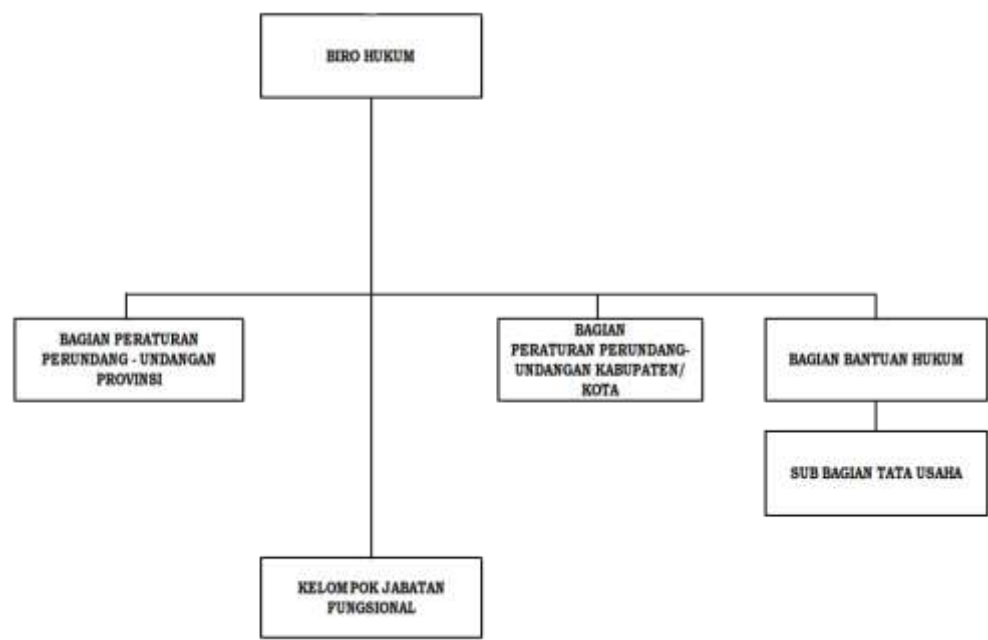
- 19) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi pertanahan;
- 20) Pelaksanaan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- 21) Penyiapan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Provinsi;
- 22) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 23) Penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- 24) Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 25) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 26) Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 27) Penyiapan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- 28) Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 29) Penyiapan bahan dan penyusunan konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- 30) Penyiapan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
- 31) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah; penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
- 32) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 33) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 34) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 35) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- 36) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 37) Penyiapan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 38) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
- 39) Penyiapan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- 40) Penyiapan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 41) Pelaksanaan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
- 42) Penyiapan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
- 43) Penyiapan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
- 44) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota;
- 45) Penyiapan bahan peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing;
- 46) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 47) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 48) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- 49) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi:

- a. Bagian Kerjasama;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Biro Hukum



Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

- Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan provinsi, Peraturan Perundang-Undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
 - 2) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan provinsi, Peraturan Perundang-Undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
 - 3) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, Peraturan Perundang-Undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
 - 4) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan provinsi, Peraturan Perundang-Undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
 - 5) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - 6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

- 7) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum membawahi:

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi;
- b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
- c. Bagian Bantuan Hukum;
- d. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Biro Kesejahteraan Rakyat



Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- 2) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- 3) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- 5) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III;
- 6) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
- 7) Penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 8) Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 9) Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 10) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 11) Penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- 12) Penyiapan bahan, pengoordinasian dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
- 13) Penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
- 14) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;

- 15) Penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
- 16) Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
- 17) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
- 18) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- 19) Penyiapan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- 20) Pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
- 21) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
- 22) Penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- 23) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- 24) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- 25) Penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- 26) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- 27) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- 28) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
- 29) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

- 30) Penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
- 31) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
- 32) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
- 33) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- 34) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- 35) Penyiapan bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- 36) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- 37) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- 38) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- 39) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan;
- 40) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan;
- 41) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial;

- 42) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sosial;
- 43) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial;
- 44) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- 45) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pendidikan;
- 46) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pendidikan;
- 47) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 48) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 49) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- 50) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:

- a . Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
- b . Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Biro Perekonomian dan Pembangunan



Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- 2) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- 3) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam, BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 7) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Kebijakan Pembangunan Daerah, Analisis Perekonomian;

- 8) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- 9) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait perumusan kebijakan daerah dan wilayah;
- 10) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan wilayah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terkait perumusan kebijakan daerah dan wilayah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan wilayah;
- 12) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan wilayah;
- 13) Penyiapan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- 14) Penyiapan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- 15) Penyiapan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- 16) Penyiapan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN;
- 17) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- 18) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- 19) Penyiapan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD dan APBN;
- 20) Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- 21) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- 22) Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;

- 23) Penyiapan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- 24) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam;
- 25) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha;
- 26) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi;
- 27) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Alam dan BUMD;
- 28) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang sumber daya alam;
- 29) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam;
- 30) Penyiapan bahan dan menyusun analisis kebijakan di bidang sumber daya alam;
- 31) Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan di bidang sumber daya alam;
- 32) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam;
- 33) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 34) Penyiapan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 35) Penyiapan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 36) Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 37) Penyiapan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 38) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 39) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;

- 40) Penyiapan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 41) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha;
- 42) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Badan Umum Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 43) Penyiapan bahan penyusunan dan analisis kebijakan Daerah dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 44) Penyiapan bahan penyiapan rencana kerja pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 45) Penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 46) Penyiapan bahan pelayanan teknis administrasi Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 47) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 48) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 49) Penyiapan bahan penyusunan data Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 50) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah bidang Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- 51) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait analisis capaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 52) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait kebijakan pembangunan daerah;
- 53) Penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait analisis perekonomian;
- 54) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas analisis capaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, analisis perekonomian;
- 55) Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian pembangunan daerah;
- 56) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian pembangunan daerah;

- 57) Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 58) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 59) Pelaksanaan pengembangan analisis capaian pembangunan daerah;
- 60) Pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 61) Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah;
- 62) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan daerah;
- 63) Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
- 64) Pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- 65) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang analisis perekonomian;
- 66) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis perekonomian;
- 67) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis perekonomian;
- 68) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 69) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 70) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- 71) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Biro Pengadaan Barang dan Jasa



Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

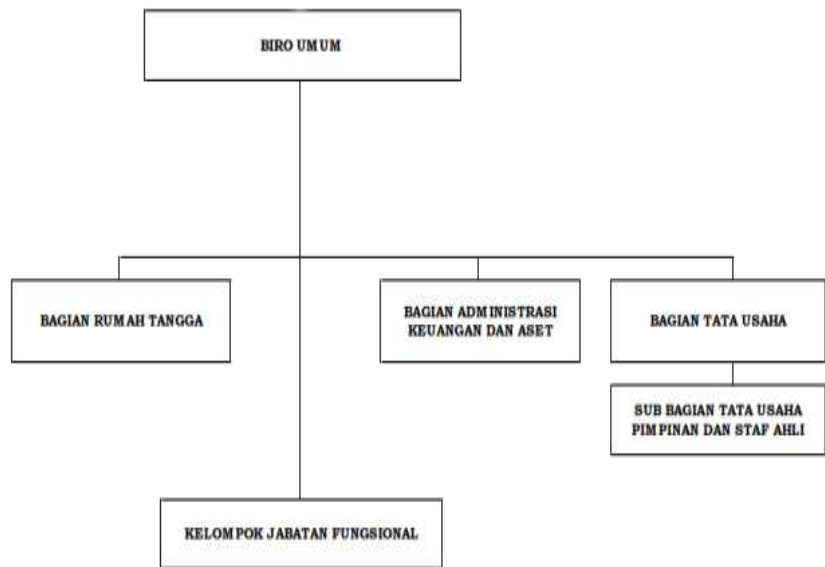
Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
- 2) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 6) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Biro Umum



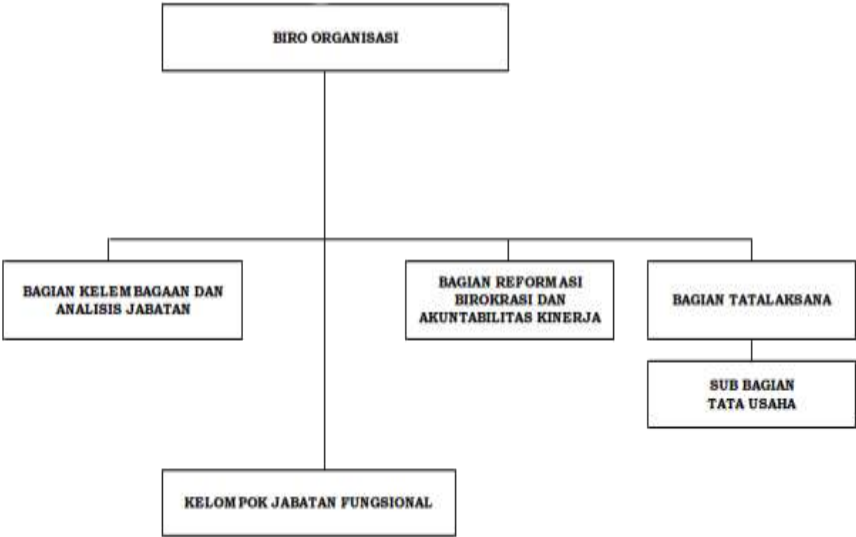
Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- 2) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 5) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum membawahi:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Biro Organisasi



Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana.

Untuk melaksanakan tugasnya Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi:

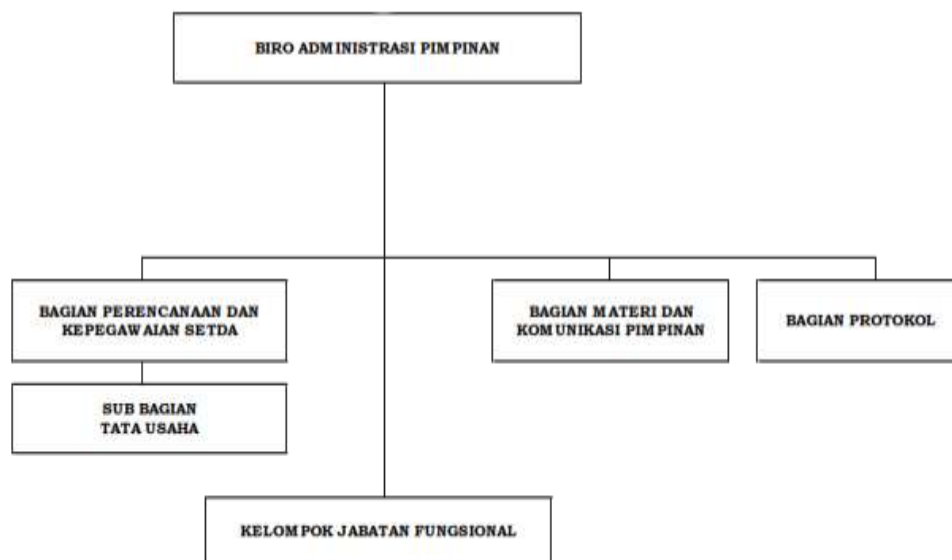
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- 2) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- 3) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- 4) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- 5) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 7) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi membawahi:

- a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Bagian Tatalaksana;
- d. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Biro Administrasi Pimpinan



Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan, protokol. Untuk melaksanakan tugasnya, Biro Administrasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- 2) penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
- 3) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- 4) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- 5) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan membawahi:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- d. Bagian Protokol; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kedudukan keuangan atas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengeluaran dan pembiayaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 atau satu periode tahun anggaran 2025. Selain tujuan di atas, penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selaku entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dimana di dalamnya menyajikan penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) secara akrual.

Demikian Laporan Keuangan ini disusun dengan harapan dapat memberikan informasi-informasi yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan/*stakeholder* sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Tanjungpinang, 3 Agustus 2026

Sekretaris Daerah,

Misni, S.K.M., M.Si.